

**PENGUATAN KEPERCAYAAN MASYARAKAT MELALUI PEMAHAMAN
LITERASI KEUANGAN DAN PENERAPAN TRANSPARANSI
DALAM PENGELOLAAN APBD OLEH
PEMERINTAH DAERAH**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Mencapai Derajat Sarjana S1



**Disusun Oleh :
SABRINA BELQIS SALSABILA
31402100092**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG SEMARANG
2025**

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

Usulan Penelitian Skripsi

**PENGUATAN KEPERCAYAAN MASYARAKAT
MELALUI PEMAHAMAN LITERASI KEUANGAN DAN PENERAPAN
TRANSPARANSI DALAM PENGELOLAAN APBD OLEH PEMERINTAH
DAERAH**

Disusun Oleh:

Sabrina Belqis Salsabila

NIM: 31402100092

Telah disetujui oleh pembimbing dan selanjutnya dapat diajukan dihadapan
sidang panitia ujian skripsi Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Universitas Islam Sultan Agung Semarang

Semarang, 1 Agustus 2025

Pembimbing,



Dr. Dedi Rusdi, S.E., M.Si., Ak., CA., CRP.

NIK. 211496006

**PENGUATAN KEPERCAYAAN MASYARAKAT
MELALUI PEMAHAMAN LITERASI KEUANGAN DAN PENERAPAN
TRANSPARANSI DALAM PENGELOLAAN APBD OLEH PEMERINTAH
DAERAH**

Disusun Oleh:

Sabrina Belqis Salsabila

NIM: 31402100092

Telah dipertahankan,

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh Gelar
Sarjana Akuntansi Tanggal 1 Agustus 2025

**Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis**



Provita Wijayanti, S.E., M.Si., Ph.D., Ak.,

CA., IFP., AWP

NIK. 211403012

Pembimbing

Dr. Dedi Rusdi, S.E., M.Si., Ak., CA.,

CRP.

NIK. 211496006

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sabrina Belqis Salsabila
NIM : 31402100092
Program Studi : S1 Akuntansi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Universitas : Islam Sultan Agung Semarang

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul :

**PENGUATAN KEPERCAYAAN MASYARAKAT MELALUI
PEMAHAMAN LITERASI KEUANGAN DAN PENERAPAN
TRANSPARANSI DALAM PENGELOLAAN APBD OLEH
PEMERINTAH DAERAH**

Merupakan karya peneliti sendiri dan tidak ada unsur *plagiarisme*. Peneliti siap menerima sanksi apabila dikemudian hari ditemukan pelanggaran etika akademik dalam penelitian ini.

Semarang, 1 Agustus 2025

Yang menyatakan,



Sabrina Belqis Salsabila
NIM 31402100092

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Sabrina Belqis Salsabila
NIM	: 31402100092
Program Studi	: S1 Akuntansi
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*~~ dengan judul :

PENGUATAN KEPERCAYAAN MASYARAKAT MELALUI PEMAHAMAN LITERASI KEUANGAN DAN PENERAPAN TRANSPARANSI DALAM PENGELOLAAN APBD OLEH PEMERINTAH DAERAH

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmedia, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 1 Agustus 2025
Yang menyatakan,



Sabrina Belqis Salsabila

NIM 31402100092

*Coret yang tidak perlu

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis limpahkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis mampu menyelesaikan penelitian Skripsi yang berjudul “Penguatan Kepercayaan Masyarakat Melalui Pemahaman Literasi Keuangan dan Penerapan Transparansi Dalam Pengelolaan APBD Oleh Pemerintah Daerah”. Sebagaimana disusun untuk memenuhi syarat akademis menyelesaikan program Sarjana (S1) Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Penulis menyadari bahwa selama penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan semua pihak, sehingga dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Heru Sulistiyo, S.E., M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Sultan Agung.
2. Ibu Provita Wijayanti, S.E., M.Si., Ak., CA selaku Ketua Prodi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Bapak Dr. Dedi Rusdi, S.E., M.Si., Ak., CA., CRP. selaku dosen pembimbing yang telah membimbing dengan baik dan memberikan arahan serta masukan kepada penulis dalam menyusun skripsi ini.
4. Seluruh dosen dan staf karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan ilmu dan pengalaman yang sangat bermanfaat bagi penulis.
5. Keluarga tercinta penulis, Ayah Rosyid, S.T., yang senantiasa memberikan nasihat, teladan, dan dorongan semangat. Ibu Eny Susilowati, S.E., yang dengan tulus mendoakan, memberikan kasih sayang, sekaligus menjadi sumber kekuatan. Serta adik Kemal Harun Al Rasyid, yang selalu memberikan dukungan. Terima kasih atas doa, perhatian, dan kasih sayang yang senantiasa menyertai setiap langkah penulis. Tersusunnya karya ilmiah ini diharapkan dapat menjadi wujud nyata dari doa, pendidikan, dan dukungan orang tua, sekaligus menjadi pijakan awal bagi penulis untuk terus berkembang menjadi pribadi yang lebih baik di masa mendatang.

Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan keberkahan, kesehatan, dan kebahagiaan kepada kita semua di dunia maupun di akhirat.

6. Sahabat terbaik penulis, Desta, Putri, Winda, Entik, Ifa, Syahda, Imel, Shafa, Sabin, Olla, Dellia, Fara, Zakiyah, Ayuk, Lian, dan teman seperjuangan yang selalu memberikan dukungan, motivasi, serta turut merayakan setiap pencapaian penulis.
7. Kucing-kucing kesayangan yang menjadi teman setia, penghibur, sekaligus sumber semangat selama penulis menempuh pendidikan di Universitas Islam Sultan Agung.
8. Tidak lupa kepada diri sendiri, Sabrina Belqis Salsabila, terima kasih telah bekerja keras, belajar, berkembang, dan menyelesaikan tanggung jawab yang telah dipilih hingga akhirnya mampu menorehkan satu lagi capaian penting dalam petualangan panjang ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan karena keterbatasan yang dimiliki penulis. Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca.

Semarang, 1 Agustus 2025

Yang menyatakan,



Sabrina Belqis Salsabila

NIM 31402100092

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh literasi keuangan dan transparansi terhadap kepercayaan masyarakat dengan tata kelola keuangan sebagai variabel mediasi. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif eksplanatif dengan menggunakan metode survei melalui penyebaran kuesioner. Sampel penelitian sebanyak 100 responden masyarakat Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal, ditentukan dengan teknik purposive sampling. Analisis data dilakukan dengan pendekatan Partial Least Squares-Structural Equation Modeling (PLS-SEM) menggunakan SmartPLS 4. Hasil penelitian menunjukkan bahwa literasi keuangan berpengaruh signifikan terhadap tata kelola keuangan, transparansi berpengaruh signifikan terhadap tata kelola keuangan, dan tata kelola keuangan berpengaruh positif terhadap kepercayaan masyarakat. Selain itu, tata kelola keuangan terbukti memediasi hubungan literasi keuangan dan transparansi terhadap kepercayaan masyarakat. Dengan demikian, peningkatan literasi keuangan masyarakat serta penerapan prinsip transparansi dalam pengelolaan APBD melalui tata kelola yang baik dapat menjadi strategi efektif untuk memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.

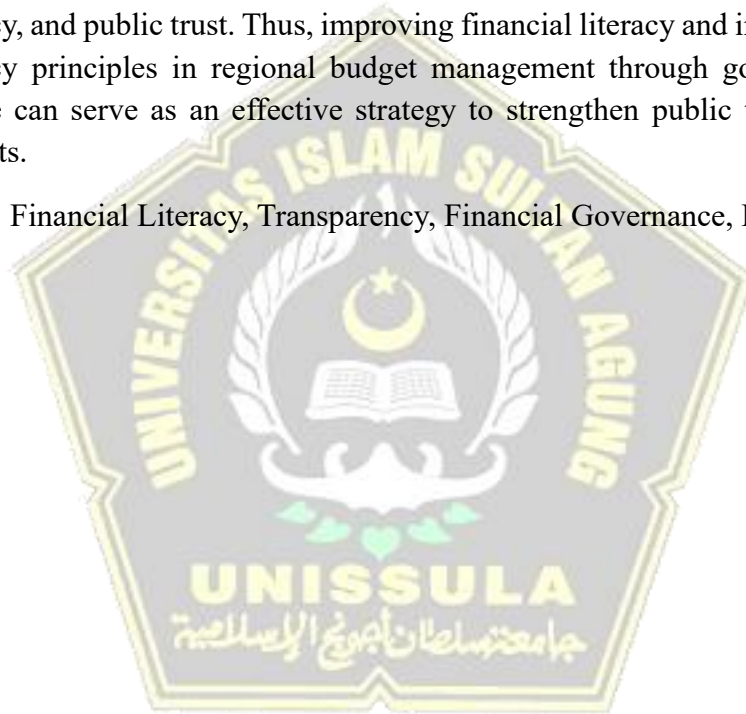
Kata Kunci: Literasi Keuangan, Transparansi, Tata Kelola Keuangan, Kepercayaan Masyarakat.



ABSTRACT

This study aims to analyze the influence of financial literacy and transparency on public trust with financial governance as a mediating variable. This research applies a quantitative explanatory approach using a survey method with questionnaires as the main instrument. The sample consisted of 100 respondents from the community in Kaliwungu District, Kendal Regency, selected through purposive sampling. Data were analyzed using Partial Least Squares-Structural Equation Modeling (PLS-SEM) with SmartPLS 4. The results show that financial literacy significantly influences financial governance, transparency significantly influences financial governance, and financial governance positively affects public trust. Furthermore, financial governance mediates the relationship between financial literacy, transparency, and public trust. Thus, improving financial literacy and implementing transparency principles in regional budget management through good financial governance can serve as an effective strategy to strengthen public trust in local governments.

Keywords: Financial Literacy, Transparency, Financial Governance, Public Trust.



DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	viii
<i>ABSTRACT</i>	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Pertanyaan Penelitian	7
1.4 Tujuan Penelitian.....	7
1.5 Manfaat Penelitian.....	8
1.5.1 Manfaat Teoritis	8
1.5.2 Manfaat Praktis.....	9
BAB II.....	11
TINJAUAN PUSTAKA.....	11
2.1 Landasan Teoritis.....	11
2.1.1 Teori Agensi	11
2.2 Variable Penelitian.....	12
2.2.1 Literasi Keuangan	12
2.2.2 Transparansi	15
2.2.3 Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah	17
2.2.4 Kepercayaan Masyarakat	20
2.3 Literatur Review	22
2.4 Pengembangan Hipotesis	26

2.5 Kerangka Konseptual Penelitian	26
BAB III	27
METODE PENELITIAN	27
3.1 Jenis Dan Pendekatan Penelitian	27
3.2 Populasi Dan Sampel.....	28
3.2.1 Populasi Penelitian.....	28
3.2.2 Sampel Penelitian	29
3.2.3 Ukuran Sampel	30
3.3 Jenis Dan Sumber Data	30
3.4 Metode Pengumpulan Data	31
3.5 Variabel Penelitian Dan Definisi Operasional Variable.....	33
3.6 Teknik Analisis Data Dan Pengujian Hipotesis.....	36
3.6.1 Analisis Deskriptif	36
3.6.2 Analisis Inferensial	37
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	43
4.1 Hasil Penelitian.....	43
4.1.1 Analisis Deskriptif	43
4.1.2 Analisis Inferensial	51
4.2 Pembahasan.....	72
4.2.1 Pengaruh Literasi Keuangan Terhadap Tata Kelola Keuangan	72
4.2.2 Pengaruh Transparansi Terhadap Tata Kelola Keuangan	74
4.2.3 Pengaruh Tata Kelola Keuangan Terhadap Kepercayaan Masyarakat .	76
4.2.4 Pengaruh Transparansi terhadap Kepercayaan Masyarakat melalui Tata Kelola Keuangan.....	77
4.2.5 Pengaruh Literasi Keuangan terhadap Kepercayaan Masyarakat melalui Tata Kelola Keuangan.....	78
BAB V PENUTUP.....	81
5.1 Simpulan.....	81
5.2 Keterbatasan Penelitian	82
5.3 Saran	83
DAFTAR PUSTAKA	85
LAMPIRAN	90

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Literatur Review	22
Tabel 2. 2 Variabel dan Indikator	33
Tabel 4. 1 Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin.....	44
Tabel 4. 2 Karakteristik responden berdasarkan usia.....	44
Tabel 4. 3 Karakteristik responden berdasarkan tingkat pendidikan	45
Tabel 4. 4 Rekapitulasi hasil statistik deskriptif Literasi Keuangan (X1).....	47
Tabel 4. 5 Rekapitulasi hasil statistik deskriptif Transparansi (X2).....	48
Tabel 4. 6 Rekapitulasi hasil statistik deskriptif Tata Kelola Keuangan (Z).....	49
Tabel 4. 7 Rekapitulasi hasil statistik deskriptif Kepercayaan Masyarakat (Y) ...	50
Tabel 4. 8 Hasil Outer Loading Uji Convergent Validity Tahap 1	54
Tabel 4. 9 Hasil Outer Loading Uji Convergent Validity Tahap 2	55
Tabel 4. 10 Hasil AVE Uji Convergent Validity	56
Tabel 4. 11 Hasil Cross Loading Uji Discriminant Validity Tahap I.....	58
Tabel 4. 12 Nilai Latent Variable Correlation, AVE dan Akar Kuadrat AVE	59
Tabel 4. 13 Nilai Cronbach's Alpha	61
Tabel 4. 14 Nilai Composite Reliability	62
Tabel 4. 15 Hasil Uji Model Fit	63
Tabel 4. 16 Hasil Uji R Square (R^2)	65
Tabel 4. 17 Hasil Uji Effect size (f^2)	67
Tabel 4. 18 Hasil Path Coefficient Bootstrapping direct effect.....	69
Tabel 4. 19 Hasil Path Coefficient Bootstrapping Indirect effect	71

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Kerangka Konseptual Penelitian	26
Gambar 4. 1 Model Latent Variable Penelitian.....	52
Gambar 4. 2 Output model PLS SEM Algorithm	67



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang transparan dan akuntabel adalah salah satu elemen kunci dalam membangun dan mempertahankan kepercayaan publik terhadap administrasi pemerintahan. Seiring dengan meningkatnya tuntutan masyarakat akan keterbukaan dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah, literasi keuangan menjadi semakin penting bagi para pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah dan masyarakat. Literasi keuangan sangat penting untuk kepentingan maupun keperluan secara individu. Sehingga dikatakan jika suatu negara mengalami suatu kemajuan ditandai dengan adanya kesadaran masyarakat akan penting dan perannya literasi keuangan di sektor keuangan (Putri et al., 2023).

Literasi keuangan mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan untuk membuat keputusan keuangan yang bijaksana. Di tingkat pemerintah daerah, literasi keuangan yang tinggi dapat meningkatkan kemampuan pengelola anggaran untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi penggunaan anggaran secara lebih transparan dan bertanggung jawab. Menurut (Mardianah & Iramani, 2021), dalam penelitiannya menemukan bahwa pengetahuan tentang keuangan dapat berdampak pada niat berperilaku seseorang. Hal ini disebabkan fakta bahwa pengetahuan tentang keuangan dapat membantu individu dalam perencanaan keuangan dan membuat keputusan yang lebih baik. Literasi keuangan yang baik juga berkontribusi pada pengelolaan risiko keuangan

dan perencanaan keuangan jangka panjang yang lebih baik, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.

Pemahaman yang baik tentang literasi keuangan memainkan peran penting dalam peningkatan efisiensi pengelolaan sumber daya oleh pemerintah daerah. Pemerintah daerah dengan tingkat literasi keuangan yang tinggi mampu merencanakan anggaran secara lebih optimal, menghindari potensi pemborosan, dan mengalokasikan sumber daya ke program yang memberikan manfaat terbesar bagi masyarakat. Literasi keuangan yang baik juga memungkinkan pengelolaan utang secara efektif, mengurangi risiko keuangan, dan menjaga stabilitas fiskal jangka Panjang. Menurut (Kaiser et al., 2020) menegaskan bahwa peningkatan literasi keuangan dapat meningkatkan kualitas pengambilan keputusan keuangan, baik pada tingkat individu maupun institusi, yang esensial bagi keberlanjutan finansial pemerintah daerah.

Prinsip transparansi dalam pengelolaan APBD melibatkan keterbukaan informasi mengenai proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi anggaran. Dilihat dari karakteristiknya, transparansi mencakup pemberian berupa informasi, berita, penjelasan mekanisme, prosedur, data, fakta kepada stakeholders yang membutuhkan informasi secara jelas dan akurat. Kedua, memberikan hak kepada setiap orang untuk memperoleh informasi dengan mengakses data yang ada di badan publik. Ketiga, pengungkapan kepada publik (stakeholders) atas aktivitas dan kinerja finansial (Mardiasmo, 2021). Menurut (Maritza & Taufiqurokhman, 2024) Kemampuan Masyarakat untuk menegakkan demokrasi sangat penting untuk mendorong transparansi, akuntabilitas, dan pencegahan korupsi. Masyarakat

memiliki kemampuan untuk memantau kegiatan opini publik, melindungi hak-hak individu, memastikan akses terhadap informasi, dan memberikan pendidikan hukum untuk menurunkan ambang batas korupsi. Hal ini dapat meningkatkan akuntabilitas pemerintah dan mencegah penyalahgunaan anggaran. Selain itu, memungkinkan pula masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, yang dapat meningkatkan legitimasi dan kualitas kebijakan publik.

Implementasi prinsip transparansi dalam pengelolaan APBD memerlukan komitmen dari pemerintah daerah untuk menyediakan informasi yang relevan dan tepat waktu kepada publik. Hal ini dapat dilakukan melalui berbagai saluran komunikasi, termasuk situs web resmi pemerintah, publikasi laporan keuangan, dan forum-forum dialog dengan masyarakat. Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dapat mempermudah akses publik terhadap informasi anggaran, sehingga meningkatkan transparansi dan partisipasi masyarakat dalam proses pengelolaan anggaran. Menurut (Sarangi & Pradhan, 2020), selain berkontribusi pada bidang penelitian sistem informasi dan literatur pertumbuhan, beberapa indikator dicantumkan untuk dipertimbangkan dalam analisis ekonomi. Penggunaan teknologi informasi dapat memainkan peran penting dalam meningkatkan transparansi anggaran. Misalnya, aplikasi mobile dan platform media sosial juga dapat digunakan untuk menyebarluaskan informasi anggaran kepada masyarakat secara cepat dan efisien. Dengan akses yang lebih mudah terhadap informasi anggaran, masyarakat dapat mengawasi penggunaan sumber daya publik dengan lebih efektif dan memberikan masukan yang lebih informatif dalam proses

pengambilan keputusan. Hal ini dapat meningkatkan akuntabilitas pemerintah dan mencegah penyalahgunaan anggaran.

Kepercayaan publik terhadap pemerintah merupakan faktor penting dalam menciptakan stabilitas dan legitimasi pemerintahan. Meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah memerlukan upaya yang berkelanjutan dan komprehensif. Pemerintah daerah perlu berkomitmen untuk menyediakan informasi yang transparan dan akurat mengenai penggunaan anggaran, serta melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Selain itu, pemerintah daerah juga perlu memastikan bahwa mekanisme pengawasan anggaran berfungsi dengan baik, pelanggaran terhadap prinsip transparansi dan akuntabilitas ditindak dengan tegas. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran publik adalah elemen krusial untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Ketidakpastian dan keraguan masyarakat terhadap kinerja lembaga ini disebabkan oleh kurangnya transparansi sistem dan kurangnya akuntabilitas dalam proses pengelolaan anggaran dan sumber daya publik (Rosidah et al., 2023). Namun, peran transparansi dan akuntabilitas dalam mencegah fraud bukanlah sekadar peningkatan akses informasi. Hal ini juga melibatkan keterbukaan dalam pengambilan keputusan, pertanggungjawaban atas tindakan, serta mekanisme hukuman dan insentif yang jelas bagi pelaku pelanggaran (World Bank, 2020).

Meskipun manfaat transparansi dalam pengelolaan APBD telah diakui secara luas, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah resistensi dari pihak-pihak yang memiliki kepentingan

dalam mempertahankan ketertutupan informasi. Penelitian oleh (Supriyadi & Prasetyo, 2021) menunjukkan bahwa kurangnya komitmen politik dan keterbatasan kapasitas teknis seringkali menjadi hambatan dalam menerapkan transparansi anggaran. Selain itu, tingkat literasi keuangan masyarakat yang rendah juga dapat mengurangi efektivitas transparansi, karena masyarakat tidak dapat memahami dan menggunakan informasi anggaran dengan baik (Rizki & Wulandari, 2022)

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan keuangan dan transparansi dalam pengelolaan APBD sangat penting. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh (Fong et al., 2021) menemukan bahwa pejabat pemerintah daerah yang lebih memahami tentang keuangan terkait dengan tingkat akuntabilitas yang lebih tinggi dan efektivitas penggunaan anggaran. Terlepas dari fakta bahwa sejumlah besar penelitian menunjukkan bahwa pemahaman yang baik tentang keuangan dan transparansi dalam pengelolaan APBD sangat penting, masih ada beberapa gap penelitian yang perlu dipenuhi. Pertama, masih sedikit penelitian yang secara khusus melihat bagaimana literasi keuangan memengaruhi transparansi dan akuntabilitas di tingkat pemerintah daerah di Indonesia. Kedua, masih kurang penelitian yang melihat bagaimana pendidikan dan pelatihan literasi keuangan berperan dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas

Dalam rangka meningkatkan dan mempertahankan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan pemerintahan, pemerintah daerah perlu meningkatkan literasi keuangan dan menerapkan prinsip transparansi dalam pengelolaan APBD. Literasi keuangan yang baik dapat membantu pengelola anggaran dan masyarakat dalam memahami dan mengelola anggaran dengan lebih

efektif dan efisien. Sementara itu, transparansi anggaran dapat meningkatkan akuntabilitas pemerintah daerah, mencegah korupsi, dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, pengetahuan memahami mengenai pengelolaan keuangan pemerintah, pengelolaan APBD yang transparan dan akuntabel adalah strategi yang efektif untuk membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, penulis tertarik untuk menyelidiki hubungan antara transparansi dan pemahaman literasi keuangan terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dilaporkan oleh pemerintah serta dampaknya terhadap kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu, penulis akan melaksanakan penelitian yang berjudul **“Penguatan Kepercayaan Masyarakat Melalui Pemahaman Literasi Keuangan Dan Penerapan Transparansi Dalam Pengelolaan APBD Oleh Pemerintah Daerah”**.

1.2 Rumusan Masalah

Dengan mengarah pada konteks latar belakang dan gap riset yang telah diungkapkan, peneliti mengidentifikasi sebuah masalah yang relevan, yaitu masih minimnya penelitian sebelumnya yang membahas dampak literasi keuangan masyarakat terhadap pemahaman mereka mengenai pengelolaan dana APBD, serta keterkaitan persepsi masyarakat terhadap transparansi dan pengelolaan anggaran oleh pemerintah daerah.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Dari paparan rumusan masalah diatas maka dapat disimpulkan bahwa pertanyaan penelitian pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah literasi keuangan masyarakat berpengaruh terhadap persepsi masyarakat mengenai tata kelola keuangan pemerintah daerah?
2. Apakah persepsi masyarakat terhadap transparansi berpengaruh terhadap persepsi mereka mengenai tata kelola keuangan pemerintah daerah?
3. Apakah persepsi masyarakat terhadap tata kelola keuangan berpengaruh terhadap kepercayaan mereka terhadap pemerintah daerah?
4. Apakah transparansi berpengaruh terhadap persepsi masyarakat melalui tata kelola keuangan?
5. Apakah literasi keuangan berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat melalui tata kelola keuangan pemerintah daerah?

1.4 Tujuan Penelitian

Mengacu dari masalah yang sebelumnya sudah peneliti rumuskan, penelitian diharapkan dapat bertujuan yang dijelaskan sebagai berikut :

1. Tujuan umum

Memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai pentingnya literasi keuangan dan transparansi dalam pengelolaan APBD dari sudut pandang masyarakat, serta mengidentifikasi strategi yang dapat digunakan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.

2. Tujuan khusus

- a. Menguji pengaruh literasi keuangan masyarakat terhadap pemahaman mereka mengenai tata kelola keuangan pemerintah daerah.
- b. Menguji pengaruh Transparansi terhadap Tata Kelola Keuangan di pemerintah daerah.
- c. Menguji pengaruh pemahaman masyarakat mengenai tata kelola keuangan terhadap tingkat kepercayaan mereka terhadap pemerintah daerah.
- d. Menguji pengaruh literasi keuangan terhadap pemahaman masyarakat melalui tata kelola keuangan pemerintah daerah.
- e. Menguji transparansi terhadap kepercayaan masyarakat melalui tata kelola keuangan pemerintah daerah.

1.5 Manfaat Penelitian

Mengacu dari rumusan masalah serta implikasi hasil dari penelitian yang dilaksanakan, kemudian diharap mampu memberikan beragam manfaat seperti:

1.5.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini akan menambah literatur tentang literasi keuangan dan transparansi, memberikan wawasan baru dan membantu mengisi celah penelitian yang ada. Ini akan memberikan dasar teoritis yang lebih kuat untuk penelitian-penelitian selanjutnya. Dengan mengidentifikasi dan menganalisis tantangan dalam implementasi literasi keuangan dan transparansi, penelitian ini akan memberikan

pemahaman yang lebih mendalam dan membantu dalam pengembangan teori-teori baru tentang kebijakan pengelolaan keuangan di sektor publik.

1.5.2 Manfaat Praktis

1) Pemerintah Daerah

Pejabat pemerintah daerah mendapatkan wawasan dan rekomendasi untuk meningkatkan literasi keuangan mereka, yang pada akhirnya juga dapat membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih baik, perencanaan anggaran yang lebih efektif, dan pelaporan yang lebih transparan dan akuntabel.

Hasil penelitian dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk memperbaiki sistem pengelolaan APBD, mengadopsi strategi untuk meningkatkan transparansi, mengatasi tantangan implementasi, dan dalam memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan partisipasi publik dan pengawasan anggaran.

2) Masyarakat Umum

Masyarakat akan mendapatkan manfaat dari program pendidikan dan pelatihan yang lebih baik yang dirancang untuk meningkatkan literasi keuangan mereka, sehingga mereka lebih mampu memahami dan mengawasi penggunaan anggaran daerah.

Penelitian ini akan memberikan rekomendasi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengelolaan anggaran, sehingga mereka dapat berperan aktif dalam mengawasi penggunaan APBD dan

memastikan bahwa anggaran tersebut digunakan sesuai dengan kebutuhan dan prioritas masyarakat.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teoritis

2.1.1 Teori Agensi

Teori agensi merupakan kerangka analitis yang digunakan untuk memahami dinamika hubungan antara prinsipal, yaitu pemegang kepentingan seperti masyarakat atau pemegang saham, dan agen, yang dalam hal ini adalah manajer atau pejabat pemerintah. Teori ini berfokus pada potensi konflik yang muncul ketika agen memiliki kepentingan pribadi yang mungkin bertentangan dengan kepentingan prinsipal. Menurut (Jensen & Meckling, 2019), konflik ini dikenal sebagai konflik keagenan dan dapat terjadi karena adanya perbedaan tujuan dan asimetri informasi antara prinsipal dan agen. Dalam konteks pengelolaan keuangan publik, teori agensi membantu dalam menganalisis bagaimana kepentingan pribadi agen dapat memengaruhi pengambilan keputusan yang seharusnya berorientasi pada kepentingan publik. Studi oleh (Khan & Ahmad, 2021) memperluas konsep ini dengan menekankan bahwa literasi keuangan di kalangan agen, seperti pejabat pemerintah, dapat memainkan peran penting dalam mengurangi konflik keagenan dengan meningkatkan pemahaman mereka tentang dampak jangka panjang dari keputusan keuangan yang mereka buat.

Relevansi teori agensi terhadap penelitian ini terletak pada kemampuannya untuk menjelaskan bagaimana literasi keuangan dan transparansi dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dapat memperkuat

kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Ketika pejabat pemerintah memiliki pemahaman yang baik tentang aspek-aspek keuangan dan menerapkan prinsip-prinsip transparansi, potensi konflik keagenan dapat diminimalkan, sehingga kepentingan masyarakat sebagai prinsipal lebih terlindungi.

Penelitian oleh (Yuwono et al., 2023) menunjukkan bahwa pengetahuan tentang keuangan sangat penting untuk perencanaan keuangan pribadi. Orang yang lebih memahami tentang keuangan cenderung membuat keputusan keuangan yang lebih baik, mengelola keuangan mereka, membuat rencana, dan menetapkan tujuan. Selain itu, penelitian ini menekankan betapa pentingnya pengetahuan, keterampilan, dan perspektif keuangan untuk perencanaan keuangan pribadi yang sukses. Dalam konteks penelitian ini, teori agensi menjadi alat yang penting untuk menganalisis bagaimana peningkatan literasi keuangan dan penerapan transparansi dapat berfungsi sebagai mekanisme kontrol yang efektif, memastikan bahwa agen bertindak sesuai dengan kepentingan masyarakat.

2.2 Variable Penelitian

2.2.1 Literasi Keuangan

Literasi keuangan telah menjadi salah satu faktor kunci yang memengaruhi kesejahteraan finansial individu dan komunitas. Definisi literasi keuangan bervariasi, namun secara umum, literasi keuangan didefinisikan sebagai kombinasi pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku yang diperlukan untuk membuat keputusan keuangan yang efektif dan mencapai kesejahteraan finansial (Lusardi & Mitchell, 2014). Literasi keuangan tidak hanya penting bagi individu dalam mengelola keuangan

pribadi mereka, tetapi juga sangat berpengaruh dalam pengelolaan keuangan publik, khususnya dalam konteks tata kelola keuangan pemerintah daerah.

Literasi keuangan melibatkan berbagai komponen yang secara bersama-sama membentuk kemampuan seseorang dalam mengelola keuangan. Pengetahuan keuangan adalah salah satu dimensi inti dari literasi keuangan. Ini mencakup pemahaman tentang konsep-konsep dasar seperti bunga majemuk, inflasi, dan diversifikasi risiko, serta pemahaman tentang berbagai produk keuangan seperti tabungan, kredit, dan investasi. Pengetahuan ini memungkinkan individu untuk membuat keputusan yang lebih cerdas terkait dengan pengelolaan keuangan mereka.

Perilaku keuangan adalah dimensi lain yang krusial dalam literasi keuangan. Perilaku keuangan merujuk pada tindakan-tindakan nyata yang diambil oleh individu dalam mengelola keuangan sehari-hari, seperti pengelolaan anggaran, menabung, mengelola utang, dan berinvestasi. Perilaku keuangan yang baik sering kali merupakan hasil dari pengetahuan keuangan yang memadai. Sebagai contoh, individu yang memiliki pemahaman yang baik tentang pentingnya menabung untuk kebutuhan darurat lebih cenderung untuk mempraktikkan perilaku menabung secara teratur.

Sikap keuangan mencerminkan keyakinan dan persepsi individu terhadap pentingnya pengelolaan keuangan yang baik. Sikap ini dapat

memengaruhi bagaimana seseorang memandang pengeluaran, tabungan, dan investasi. Misalnya, seseorang yang memiliki sikap positif terhadap menabung dan berinvestasi akan lebih cenderung mengalokasikan sebagian pendapatannya untuk tujuan-tujuan tersebut, daripada menghabiskan semuanya untuk konsumsi jangka pendek.

Selain itu, kemampuan pengambilan keputusan keuangan juga merupakan bagian integral dari literasi keuangan. Kemampuan ini mencakup keterampilan dalam menganalisis informasi keuangan, mengevaluasi opsi yang tersedia, dan membuat keputusan yang akan memberikan hasil terbaik dalam jangka panjang. Sebagai contoh, dalam memilih antara produk investasi yang berbeda, individu yang literat secara finansial akan dapat mempertimbangkan faktor risiko dan pengembalian, serta kesesuaian produk tersebut dengan tujuan keuangan jangka panjangnya.

Literasi keuangan tidak hanya penting pada tingkat individu, tetapi juga memiliki implikasi yang signifikan dalam konteks pengelolaan keuangan publik. Dalam penelitian yang berfokus pada pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), literasi keuangan dianggap sebagai faktor yang dapat meningkatkan tata kelola keuangan pemerintah daerah. Pemerintah daerah yang memiliki pemahaman keuangan yang baik akan lebih mampu mengelola anggaran dengan transparan dan akuntabel, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat.

(Lusardi & Mitchell, 2014) menekankan bahwa literasi keuangan adalah kemampuan untuk menggunakan pengetahuan dan keterampilan keuangan untuk mengelola sumber daya keuangan secara efektif sepanjang hidup. Dalam konteks pemerintah daerah, ini berarti pejabat dan staf yang literat secara finansial akan lebih mampu untuk membuat keputusan yang memaksimalkan manfaat dari anggaran publik, menghindari korupsi, dan mengoptimalkan pengelolaan sumber daya yang terbatas.

Penelitian juga menunjukkan bahwa literasi keuangan memiliki dampak signifikan terhadap perilaku keuangan yang bertanggung jawab. (Kaiser & Menkhoff, 2017) dalam studinya menemukan bahwa pendidikan keuangan yang ditingkatkan memiliki dampak yang signifikan pada peningkatan literasi keuangan dan perilaku keuangan individu. Ini menunjukkan bahwa upaya untuk meningkatkan literasi keuangan, baik pada tingkat individu maupun organisasi, dapat menghasilkan keputusan keuangan yang lebih baik dan lebih bertanggung jawab.

2.2.2 Transparansi

Transparansi dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah aspek penting yang mengacu pada keterbukaan pemerintah daerah dalam menyampaikan informasi terkait perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi anggaran kepada publik. Transparansi merupakan fondasi untuk menciptakan akuntabilitas pemerintah, memungkinkan masyarakat untuk memantau penggunaan dana publik, serta berperan dalam

mencegah korupsi dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Untuk mencapai transparansi yang efektif, pemerintah daerah sering kali menggunakan teknologi informasi untuk menyebarluaskan informasi anggaran kepada masyarakat. Banyak pemerintah daerah yang telah mengadopsi platform online untuk mempublikasikan dokumen anggaran, pelaporan keuangan, dan informasi terkait lainnya. Langkah ini tidak hanya meningkatkan aksesibilitas informasi tetapi juga memungkinkan masyarakat untuk memberikan masukan secara langsung. (Rahmatika & Martyas Edi, 2022) membahas pengembangan sistem informasi keuangan berbasis web di Dusun Sidawung. Penelitian ini memang menunjukkan bahwa sistem berbasis web memungkinkan masyarakat memantau aktivitas dan aliran dana secara detail, sehingga meningkatkan transparansi dan mengurangi kesalahan atau risiko kecurangan.

Transparansi memiliki dampak langsung terhadap kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Ketika pemerintah transparan dalam pengelolaan anggaran, masyarakat merasa lebih yakin bahwa dana publik dikelola dengan baik dan sesuai dengan kepentingan publik. Transparansi juga membantu mengurangi potensi terjadinya korupsi, karena adanya pengawasan publik yang ketat.

Penelitian oleh (Aziz et al., 2024) menunjukkan dalam riset mengenai pemerintahan desa menyimpulkan bahwa akuntabilitas dan

transparansi yang baik secara signifikan meningkatkan kepercayaan masyarakat, juga mendukung partisipasi aktif, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pengawasan efektif.

2.2.3 Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah

Pengelolaan keuangan pemerintah merupakan aspek yang sangat penting dalam administrasi publik, yang melibatkan berbagai tahapan mulai dari perencanaan hingga pelaporan keuangan. Setiap tahapan dalam pengelolaan keuangan ini saling terkait dan berperan dalam memastikan bahwa dana publik digunakan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan.

Unsur-unsur yang terkandung dalam pengelolaan keuangan adalah sebagai berikut :

1. **Perencanaan Keuangan**

Tahap ini melibatkan proses identifikasi kebutuhan pembangunan dan penentuan prioritas alokasi sumber daya. Dalam konteks pemerintah daerah, perencanaan keuangan mencakup penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang menjadi acuan dalam penyusunan APBD. Perencanaan yang matang memungkinkan alokasi anggaran yang tepat sasaran dan dapat menghindari pemborosan serta korupsi.

2. **Penganggaran**

Penganggaran merupakan proses formalisasi dari rencana keuangan yang telah disusun. APBD sebagai produk dari penganggaran merupakan dokumen hukum yang mengatur pendapatan dan belanja daerah selama satu tahun anggaran. Penganggaran yang baik harus mencerminkan kebutuhan riil masyarakat dan sesuai dengan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan. Keterlibatan publik dalam proses penganggaran juga penting untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas.

3. Pelaksanaan Anggaran

Setelah anggaran disahkan, tahap selanjutnya adalah pelaksanaan anggaran. Tahap ini mencakup proses pengeluaran dana sesuai dengan alokasi yang telah ditetapkan dalam APBD. Pelaksanaan anggaran harus diawasi dengan ketat untuk mencegah penyalahgunaan dan memastikan bahwa dana digunakan sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan.

4. Pengawasan dan Pengendalian Keuangan

Pengawasan dilakukan oleh berbagai pihak, termasuk Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), inspektorat daerah, dan juga masyarakat. Pengendalian internal yang kuat diperlukan untuk memastikan bahwa setiap pengeluaran sesuai dengan ketentuan dan tidak terjadi penyelewengan. Pengawasan yang efektif juga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan daerah.

5. Pelaporan dan Akuntabilitas

Tahap akhir dari pengelolaan keuangan adalah pelaporan dan akuntabilitas. Pemerintah daerah wajib menyusun laporan keuangan yang transparan, yang mencakup laporan realisasi anggaran, neraca, laporan operasional, dan laporan perubahan ekuitas. Laporan keuangan yang baik adalah yang disusun secara akurat, tepat waktu, dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. Pelaporan yang transparan merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada publik dan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Ketika pemerintah daerah mampu mengelola keuangan dengan baik dan transparan, masyarakat cenderung lebih percaya pada pemerintahan. Literasi keuangan di sini memainkan peran penting dalam membantu masyarakat memahami bagaimana anggaran daerah dikelola, dari mulai perencanaan hingga pelaporan. Menurut penelitian (Suhardi et al., 2023) menyimpulkan bahwa transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi secara bersama-sama memberikan dampak positif dan signifikan terhadap kepercayaan masyarakat dalam pengelolaan dana desa.

Studi lain oleh (Della et al., 2025) menekankan bahwa peningkatan literasi keuangan publik, serta kemudahan akses informasi dan penyederhanaan prosedur pelaporan, sangat krusial untuk memperkuat pengawasan oleh masyarakat atas pengelolaan anggaran dan mencegah potensi korupsi. Hal ini menunjukkan bahwa ada korelasi langsung antara

literasi keuangan masyarakat dan efektivitas pengawasan publik terhadap pengelolaan keuangan daerah.

Secara keseluruhan, pengelolaan keuangan pemerintah yang baik dan transparan sangat penting dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat. Literasi keuangan masyarakat yang memadai memperkuat pengawasan publik dan mendorong transparansi lebih lanjut dalam pengelolaan APBD, yang pada akhirnya dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.

2.2.4 Kepercayaan Masyarakat

Kepercayaan Masyarakat adalah suatu keyakinan atau kepercayaan yang dimiliki oleh masyarakat terhadap institusi, organisasi, atau individu, yang mencerminkan sejauh mana masyarakat mempercayai bahwa pihak tersebut akan bertindak dengan integritas, transparansi, dan untuk kepentingan bersama. Kepercayaan ini sangat penting dalam konteks pemerintahan, di mana masyarakat perlu merasa yakin bahwa pemerintah akan mengelola sumber daya publik secara efektif dan transparan.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Asten et al., 2025), meneliti pengaruh transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa terhadap tingkat kepercayaan masyarakat di Desa Barih Lhok, Kecamatan Kuta Cot Glie, Kabupaten Aceh Besar. Hasil analisis kuantitatif dengan SPSS menunjukkan bahwa kedua variabel transparansi dan akuntabilitas, baik secara parsial maupun simultan memberikan

pengaruh yang signifikan terhadap kepercayaan masyarakat. Temuan ini menguatkan premis bahwa penerapan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang terbuka dan bertanggung jawab dapat secara langsung meningkatkan legitimasi lokal pemerintah desa.

Lebih lanjut, dalam konteks literasi keuangan, literasi yang baik di kalangan masyarakat dapat memperkuat kepercayaan mereka terhadap pemerintah. Penelitian oleh (Rinaldi & Devi, 2022) menunjukkan bahwa literasi keuangan tidak secara langsung meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi publik, melainkan bekerja melalui jalur akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan sebagai variabel intervening. Dengan demikian, literasi keuangan menjadi efektif dalam membangun kepercayaan masyarakat hanya jika pemerintah atau lembaga pengelola dana menyediakan informasi pengelolaan keuangan yang terbuka dan mekanisme pertanggungjawaban yang dapat diakses publik. Temuan ini menegaskan pentingnya literasi keuangan publik sebagai fondasi intelektual, yang kemudian harus disertai dengan praktik akuntabilitas dan transparansi untuk menghasilkan kepercayaan masyarakat yang hakiki.

Dalam hubungannya dengan penelitian tentang penguatan kepercayaan masyarakat melalui pemahaman literasi keuangan dan penerapan transparansi dalam pengelolaan APBD, penting untuk menyoroti bahwa kepercayaan tidak bisa hanya dibangun melalui retorika. Penelitian menunjukkan bahwa kepercayaan masyarakat adalah hasil dari interaksi antara informasi yang diberikan pemerintah dan kemampuan masyarakat

untuk memahaminya. Ketika pemerintah daerah berusaha meningkatkan literasi keuangan masyarakat, dan pada saat yang sama menerapkan transparansi dalam pengelolaan APBD, mereka menciptakan lingkungan di mana masyarakat dapat secara kritis menilai tindakan pemerintah dan merasa lebih percaya.

2.3 Literatur Review

Berikut yakni beragam penelitian terkait literasi keuangan dan transparansi dalam pengelolaan APBD, serta strategi-strategi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap administrasi pemerintahan yang sebelumnya sudah banyak dilaksanakan, dimana membuat hasil dari penelitian tersebut bisa dimanfaatkan menjadi acuan untuk melaksanakan penelitian. Penelitian tersebut meliputi :

Tabel 2. 1 Literatur Review

No	Peneliti	Judul	Variable & Alat Ukur	Hasil Penelitian
1	Maritza, D.F., & Taufiqurokhman, T. (2024)	Peranan Masyarakat Sipil dalam Peningkatan Akuntabilitas Birokrasi Melalui	a. Independen : Transparansi b. Dependen : Kepercayaan Masyarakat c. Alat ukur : Survei,	Transparansi yang tinggi meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

		Pengawasan Publik yang Aktif	Kuesioner, Studi Kasus	
2	Setiawan, A., Pramita, E. (2023)	Pengaruh Literasi Keuangan terhadap Pengelolaan APBD dan Kepercayaan Publik	a. Independen : Literasi Keuangan b. Dependen : Kepercayaan Masyarakat c. Alat ukur : Survei Kuantitatif	Literasi keuangan pejabat pemerintah meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan APBD.
3	Prasetyo, B., Herlina, S. (2023)	Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas terhadap Kepercayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Anggaran Publik	a. Independen : Transparansi, Akuntabilitas b. Dependen : Kepercayaan Masyarakat c. Alat ukur : Survei, Model Persamaan Struktural	Transparansi dan akuntabilitas yang baik memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

4	Fong, J.H., Koh, B.S.K., et al. (2021)	Financial Literacy and Public Trust: An Analysis of Financial Knowledge and Trust in Government	a. Independen : Literasi Keuangan b. Dependen : Kepercayaan Masyarakat c. Alat ukur : Survei Kuantitatif	Literasi keuangan yang baik meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap keputusan finansial pemerintah.
5	Rizki, R., Wulandari, T. (2022)	Implikasi Transparansi Anggaran terhadap Efektivitas Pengelolaan APBD di Pemerintah Daerah	a. Independen : Transparansi b. Dependen : Kepercayaan Masyarakat c. Alat ukur : Survei Kualitatif, Analisis Kualitatif	Kurangnya literasi keuangan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap tata kelola keuangan.
6	Wawan Gunawan, et al. (2023)	Literasi Keuangan dan Kepercayaan	a. Independen : Literasi Keuangan	Terdapat korelasi positif antara literasi keuangan

		Masyarakat pada Program Pemerintah: Studi Korelasional	b. Dependen : Kepercayaan Masyarakat c. Alat ukur : Analisis korelasional data survei	dan kepercayaan masyarakat pada program pemerintah
7	Nurul Hidayah, et al. (2022)	Transparansi dan Kepercayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Dana Publik	a. Independen : Transparansi Keuangan b. Dependen : Kepercayaan Masyarakat c. Alat ukur : Model persamaan struktural	Transparansi dalam pengelolaan dana publik penting untuk mempertahankan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat
8	Budi Prasetyo, et al. (2022)	Literasi Keuangan, Kepercayaan Masyarakat, dan Perilaku	a. Independen : Literasi Keuangan b. Dependen : Kepercayaan Masyarakat	Tingkat literasi keuangan yang lebih tinggi berhubungan dengan peningkatan

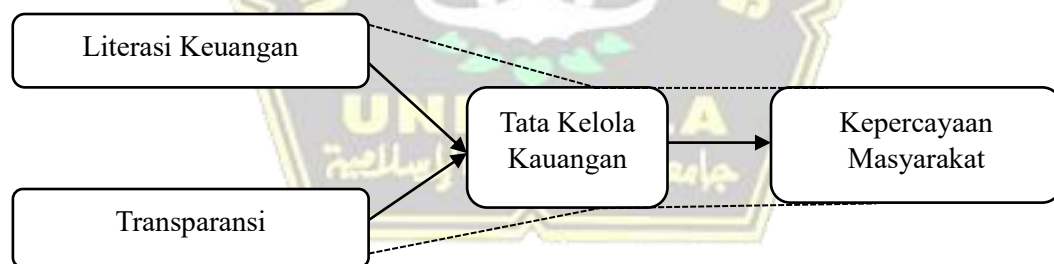
		Investasi: Bukti dari Indonesia	c. Alat ukur : Survei dan analisis regresi	kepercayaan masyarakat, yang pada gilirannya mempengaruhi perilaku investasi secara positif
--	--	---------------------------------	--	---

2.4 Pengembangan Hipotesis

2

2.5 Kerangka Konseptual Penelitian

Berbasis atas keterangan serta definisi – definisi mengenai variabel, hubungan korelasi yang telah dijabarkan beserta hipotesis yang dirumuskan, maka kerangka konseptual yang dipergunakan pada riset ini adalah sebagai berikut:



Gambar 1.1 Kerangka Konseptual Penelitian

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif eksplanatif. Penelitian kuantitatif eksplanatif dipilih karena bertujuan untuk menguji hubungan kausal antara variabel-variabel yang telah ditentukan, yakni literasi keuangan, transparansi, tata kelola keuangan, dan kepercayaan masyarakat. Penelitian eksplanatif memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, sehingga dapat menjelaskan fenomena yang terjadi berdasarkan data yang terukur.

Jenis penelitian ini cocok untuk mengungkap hubungan sebab-akibat antar variabel, pada penelitian (Sari et al., 2023) penelitian eksplanatori bertujuan untuk menjelaskan hubungan antara dua atau lebih gejala atau variabel dan menjelaskan sebab terjadinya suatu peristiwa. Melalui pendekatan ini, penelitian dapat memberikan gambaran yang lebih jelas dan terukur mengenai pengaruh literasi keuangan dan transparansi dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terhadap kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.

Lebih lanjut, penelitian kuantitatif eksplanatif memungkinkan penggunaan teknik statistik untuk menguji hipotesis yang dirumuskan. Seperti yang dijelaskan oleh (Waruwu et al., 2025), pendekatan kuantitatif dalam penelitian eksplanatif memudahkan peneliti dalam menguji hipotesis melalui analisis statistik yang dapat menghasilkan temuan yang objektif dan dapat digeneralisasikan. Sehingga,

pendekatan ini diharapkan dapat memberikan hasil penelitian yang valid dan dapat diandalkan untuk memahami pengaruh variabel-variabel yang diteliti dalam konteks pemerintahan daerah.

3.2 Populasi Dan Sampel

Peneliti memberikan alasan kuat terkait pengambilan sampel di Kecamatan Kaliwungu sebagai fokus penelitian, penting untuk meninjau berbagai aspek yang mendukung keputusan ini, baik berdasarkan kondisi terkini maupun temuan dari penelitian terdahulu. Berikut beberapa poin yang dapat dijadikan dasar, yaitu letak demografis dan signifikansi wilayah, volume penggunaan APBD, kasus dan tantangan pengelolaan APBD, dan akses teknologi dan partisipasi publik.

3.2.1 Populasi Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang berdomisili di Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal, yang memiliki kepedulian atau keterlibatan terhadap pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini mencakup warga yang aktif dalam kegiatan musyawarah desa, kegiatan kemasyarakatan, atau yang mengakses informasi publik tentang penggunaan dana pemerintah daerah.

Pemilihan masyarakat sebagai populasi didasarkan pada tujuan penelitian, yaitu untuk menganalisis sejauh mana literasi keuangan dan persepsi terhadap transparansi berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pendekatan ini dipilih karena variabel-variabel yang diteliti, seperti literasi keuangan dan transparansi, dianggap memiliki relevansi yang luas dan tidak

terbatas pada suatu lokasi spesifik. Menurut (Hildawati, 2024) populasi yang luas dan sampel yang representatif memungkinkan peneliti membuat generalisasi yang valid terhadap keseluruhan populasi.

3.2.2 Sampel Penelitian

Sampel penelitian ini diambil dari populasi dengan menggunakan teknik purposive sampling pada masyarakat. Teknik purposive sampling memungkinkan peneliti memilih subjek dengan karakteristik khusus yang relevan dengan tujuan penelitian, sehingga temuan yang diperoleh lebih akurat dan sesuai dengan fokus penelitian (Subhaktiyasa, 2024). Dan penelitian menurut penelitian (Azora, 2021) menemukan bahwa stratified random sampling dapat membagi populasi yang heterogen ke dalam sub-sub populasi yang homogen, sehingga hasil survei lebih representatif dan dapat digeneralisasikan. Adapun kriteria yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Berdomisili di Kecamatan Kaliwungu minimal 2 tahun.
2. Berusia ≥ 20 tahun dan sudah memiliki pengalaman mengakses atau mengetahui informasi terkait APBD (misalnya melalui RT/RW, musrenbang, berita, media sosial).
3. Bersedia menjadi responden dan mengisi kuesioner secara jujur dan sadar.

Alasan menggunakan purposive sampling adalah karena tidak semua masyarakat memiliki literasi keuangan atau akses terhadap informasi APBD, sehingga responden perlu dipilih secara spesifik untuk mewakili populasi yang relevan dengan topik penelitian.

3.2.3 Ukuran Sampel

Penentuan ukuran sampel menggunakan rumus Slovin, karena jumlah populasi di Kecamatan Kaliwungu cukup besar dan tidak diketahui secara pasti siapa saja yang memenuhi kriteria inklusi. Dengan metode pengambilan sampel ini diharapkan hasilnya dapat cenderung lebih mendekati nilai aslinya dan diharapkan dapat memperkecil terjadinya kekeliruan terhadap nilai populasi (Soputra et al., 2023). Rumus Slovin:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Keterangan:

- n = jumlah sampel
- N = jumlah populasi (jumlah KK)
- e = Toleransi Kesalahan (sampling error)

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

$$n = \frac{3.650}{1 + 3.659 (0,1)^2} = \frac{3.650}{1 + 26,5} = \frac{3.650}{37,5} = 97,33$$

Jadi, sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 97,33 responden dan untuk memudahkan peneliti sehingga dibulatkan menjadi 98 responden diperluas menjadi 100 responden.

3.3 Jenis Dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data primer. Data primer adalah data yang dikumpulkan langsung dari responden melalui survei dan wawancara terstruktur.

Data primer diperoleh melalui penyebaran kuesioner secara langsung kepada masyarakat yang berdomisili di Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal. Instrumen penelitian berupa kuesioner tertutup dengan skala Likert, yang dirancang untuk mengukur empat variabel utama: literasi keuangan, persepsi terhadap transparansi pengelolaan APBD, persepsi terhadap tata kelola keuangan, dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.

Kuesioner disebarkan kepada responden yang dipilih berdasarkan kriteria purposive sampling, yaitu:

- Warga berdomisili di Kecamatan Kaliwungu,
- Berusia minimal 20 tahun,
- Memiliki pengalaman atau akses terhadap informasi terkait penggunaan APBD atau kegiatan pemerintahan daerah.

Responden diminta mengisi kuesioner secara mandiri, baik secara luring (langsung) maupun daring (jika diperlukan), untuk menjaga efektivitas pengumpulan data.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini mencakup beberapa teknik utama yaitu survei kuesioner, wawancara terstruktur, dan pengumpulan data sekunder. Setiap metode dipilih untuk mengumpulkan data yang relevan dan dapat diandalkan untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan.

1. **Survei Kuesioner:** Kuesioner adalah alat utama yang digunakan untuk mengumpulkan data primer dalam penelitian ini. Kuesioner terstruktur dirancang dengan pertanyaan tertutup dan terbuka untuk mengukur variabel seperti literasi keuangan, transparansi, tata kelola keuangan, dan kepercayaan masyarakat. Teknik ini memungkinkan pengumpulan data dalam jumlah besar secara cepat dan analisis statistik yang efisien sejalan dengan metodologi yang digunakan dalam penelitian oleh (Judijanto et al., 2024) di mana kuesioner Likert memberikan temuan kuantitatif yang kuat.
2. **Wawancara Terstruktur:** Wawancara terstruktur diterapkan untuk memperoleh informasi mendalam dari tokoh masyarakat yang memiliki wawasan langsung tentang transparansi dan akuntabilitas. Pendekatan ini membantu mengungkap nuansa yang tidak tertangkap melalui kuesioner saja, pendekatan yang juga digunakan dalam penelitian (Mastur et al., 2025), yang mengeksplorasi hubungan antara e-government, transparansi, dan kepercayaan publik melalui wawancara semi-terstruktur.
3. **Dokumen dan Laporan Resmi:** Data sekunder dari dokumen dan laporan resmi seperti laporan keuangan dan anggaran untuk menguatkan hasil data primer. Pendekatan ini relevan dengan studi oleh (Susanti et al., 2025), yang menggabungkan data sekunder, wawancara, dan observasi untuk menganalisis tata kelola keuangan desa dalam kerangka transparansi dan akuntabilitas.

3.5 Variabel Penelitian Dan Definisi Operasional Variable

Penelitian ini melibatkan empat variabel utama, yaitu literasi keuangan (X1), transparansi (X2), tata kelola keuangan (Z), dan kepercayaan masyarakat (Y). Terkait definisi operasional dan indikator variabel dijelaskan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2. 2 Variabel dan Indikator

No	Variable Penelitian	Definisi Operasional	Indikator	Referensi
1.	Literasi Keuangan (X1)	Literasi keuangan didefinisikan sebagai tingkat pengetahuan dan pemahaman individu mengenai konsep-konsep dasar keuangan serta kemampuan untuk menggunakan pengetahuan tersebut dalam pengambilan keputusan finansial.	1. Pengetahuan dasar keuangan. 2. Kemampuan mengelola keuangan pribadi. 3. Pengetahuan terhadap Produk/Layanan Jasa Keuangan. 4. Kemampuan menilai efektivitas pengelolaan keuangan publik	(Chen & Volpe, 1998) (OJK, 2022)
2.	Transparansi (X2)	Transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah	1. Pemerintah desa secara berkala melaporkan informasi tentang	(Sofyani & Tahar, 2021)

		<p>didefinisikan sebagai tingkat keterbukaan pemerintah daerah dalam menyampaikan informasi keuangan dan anggaran kepada publik.</p>	<p>perolehan dan penggunaan uang desa (APBDes).</p> <p>2. Pemerintah desa secara berkala melaporkan informasi tentang kegiatan desa yang telah dilaksanakan.</p> <p>3. Pemerintah desa secara berkala melaporkan informasi tentang capaian prestasi desa yang telah diraih.</p> <p>4. Adanya akses publik terhadap laporan yang telah dibuat.</p>	<p>Teguh Kurniawan (2003)</p>
3.	<p>Tata Kelola Keuangan (Z)</p>	<p>Tata kelola keuangan didefinisikan sebagai prosedur, kebijakan, dan praktik yang diterapkan oleh pemerintah daerah dalam mengelola keuangan publik dengan efektif,</p>	<p>1. Pemerintah daerah menyampaikan laporan penggunaan anggaran secara terbuka kepada masyarakat. (3)</p> <p>2. Pemerintah daerah bertanggung jawab terhadap hasil penggunaan APBD. (1)</p>	<p>(Sofyani & Tahar, 2021)</p>

		efisien, dan akuntabel.	<p>3. Pengelolaan anggaran dilakukan sesuai dengan aturan dan prosedur yang berlaku. (2)</p> <p>4. Anggaran digunakan secara efisien dan tepat sasaran. (5)</p>	
4.	Kepercayaan Masyarakat (Y)	Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah didefinisikan sebagai tingkat keyakinan dan kepercayaan warga terhadap kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan publik dengan baik dan transparan.	<p>1. Pemerintah desa bekerja secara amanah (dapat dipercaya).</p> <p>2. Pemerintah desa bekerja untuk kepentingan rakyat.</p> <p>3. Keyakinan terhadap kompetensi.</p> <p>4. Kepuasan masyarakat terhadap hasil kerja pemerintah desa.</p> <p>5. Masyarakat patuh terhadap himbauan dari pemerintah desa.</p>	(Sofyani & Tahar, 2021)

3.6 Teknik Analisis Data Dan Pengujian Hipotesis

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode analisis data berbasis Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM), yang dioperasikan melalui perangkat lunak SmartPLS versi 4. Teknik PLS dipilih karena sesuai untuk model penelitian dengan konstruk laten, jumlah sampel relatif kecil, dan data yang tidak harus berdistribusi normal (Hair et al., 2021).

Pendekatan ini dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian untuk menguji hubungan kausal antara variabel-variabel yang telah ditentukan. Tujuan utama dari uji terhadap variabel-variabel di atas adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh literasi keuangan dan transparansi terhadap kepercayaan masyarakat secara langsung serta peran tata kelola keuangan sebagai variabel mediasi, yaitu untuk mengetahui apakah tata kelola yang baik dapat memperkuat hubungan antara literasi keuangan dan transparansi terhadap kepercayaan masyarakat.

Melalui uji statistik, peneliti dapat mengidentifikasi hubungan kausal antar variabel serta mengukur pengaruh langsung dan tidak langsung, termasuk variabel intervening seperti dalam penelitian ini. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk membuktikan hipotesis yang diajukan secara empiris.

3.6.1 Analisis Deskriptif

Menurut (Sugiyono, 2020), analisis deskriptif digunakan untuk menganalisis data dengan mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah dikumpulkan sebagaimana adanya, tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang

berlaku umum atau generalisasi. Penyajian data dalam analisis ini dapat dilakukan melalui tabel, grafik, diagram lingkaran, *pictogram*, serta perhitungan statistik sederhana seperti modus, median, mean, desil, persentil, standar deviasi, dan persentase.

Sementara itu, (Ferdinand, 2014) menjelaskan bahwa analisis deskriptif bertujuan memberikan gambaran atau deskripsi empiris berdasarkan data yang diperoleh dalam penelitian. Dengan demikian, analisis deskriptif bermanfaat untuk menyajikan informasi awal yang dapat membantu memahami data sebelum dilakukan pengujian lebih lanjut.

Dalam penelitian ini, analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan karakteristik responden dan variabel penelitian sehingga diperoleh gambaran awal sebelum memasuki tahap analisis inferensial.

3.6.2 Analisis Inferensial

3.6.2.1 Pengujian Model Pengukuran (Outer Model)

Pengujian outer model bertujuan untuk mengevaluasi validitas dan reliabilitas konstruk laten berdasarkan indikator-indikator yang digunakan dalam penelitian. Evaluasi ini mencakup tiga aspek utama, yaitu convergent validity, discriminant validity, dan reliabilitas konstruk, dengan penjelasan sebagai berikut:

- Convergent Validity, menunjukkan sejauh mana indikator-indikator dalam satu konstruk berkorelasi tinggi satu sama lain. Pengujian ini dilakukan melalui nilai outer loading dan Average Variance Extracted (AVE).

- Suatu indikator dinyatakan valid apabila memiliki nilai loading factor $\geq 0,70$ (Hamid & Anwar, 2019; Haryono, 2016; Savitri et al., 2021; Wiyono, 2020)
- Namun, beberapa literatur menyebutkan bahwa nilai loading factor $\geq 0,60$ masih dianggap cukup (Wiyono, 2020), bahkan loading $\geq 0,50$ masih dapat diterima dalam kondisi tertentu (Haryono, 2016).
- Selain itu, nilai AVE pada setiap konstruk harus $\geq 0,50$ agar memenuhi kriteria validitas konvergen (Haryono, 2016).

Dengan terpenuhinya kriteria tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa indikator dalam penelitian ini mampu merefleksikan konstruk yang diukur dengan baik.

- Discriminant Validity, untuk menguji sejauh mana suatu konstruk benar-benar berbeda dari konstruk lain. Pengujian ini dilakukan dengan beberapa pendekatan, yaitu:
 - Cross Loading, di mana korelasi antara indikator dengan konstruknya harus lebih tinggi dibandingkan dengan korelasi terhadap konstruk lain (Budhi, 2018; Haryono, 2016; Wiyono, 2020).
 - Fornell-Larcker Criterion, yaitu dengan membandingkan nilai akar AVE dari suatu konstruk dengan korelasi antar konstruk. Validitas diskriminan terpenuhi jika nilai akar AVE suatu konstruk lebih besar daripada korelasi dengan konstruk lainnya (Budhi, 2018; Haryono, 2016; Savitri et al., 2021).

- Latent Variable Correlation, di mana nilai korelasi antar variabel laten harus lebih kecil dibandingkan dengan akar kuadrat AVE dari masing-masing variabel (Hamid & Anwar, 2019).
- Reliabilitas Konstruk, Uji reliabilitas konstruk bertujuan untuk mengukur konsistensi internal dari indikator-indikator dalam mengukur suatu konstruk laten. Dua alat ukur yang digunakan adalah Composite Reliability (CR) dan Cronbach's Alpha.
 - Nilai Cronbach's Alpha $\geq 0,70$ menunjukkan reliabilitas yang baik (Savitri et al., 2021; Wiyono, 2020). Namun, nilai $\geq 0,60$ masih dapat ditoleransi dalam penelitian eksploratif (Budhi, 2018; Haryono, 2016).
 - Nilai Composite Reliability (CR) $\geq 0,70$ menunjukkan bahwa konstruk memiliki reliabilitas yang memadai (Hamid & Anwar, 2019; Haryono, 2016; Savitri et al., 2021; Wiyono, 2020).

3.6.2.2 Validasi Model Fit

Setelah model pengukuran memenuhi kriteria validitas dan reliabilitas, langkah berikutnya adalah menguji validasi model fit. Pengujian model fit dalam pendekatan PLS-SEM dilakukan untuk memastikan bahwa model penelitian yang dibangun layak digunakan untuk analisis lebih lanjut. Beberapa indikator yang digunakan dalam evaluasi model fit antara lain:

- Standardized Root Mean Square Residual (SRMR), mengukur selisih antara matriks kovarians yang diobservasi dengan yang diprediksi.

- Model dinyatakan fit apabila nilai SRMR $< 0,10$ (Garson, 2016; Santoso & Rahardjo, 2021; Wiyono, 2020).
- Beberapa literatur lebih ketat menyarankan nilai SRMR $< 0,08$ sebagai batas ideal untuk menunjukkan model yang lebih baik (Ringle et al., 2024; Sarstedt et al., 2021).
- d-ULS dan d-G, pengukuran ketepatan model berdasarkan pendekatan bootstrap. Model dikatakan fit apabila nilai confidence interval (CI) lebih besar dari original sample (OS). (Wiyono, 2020)
- Chi-Square (χ^2), menguji statistik χ^2 digunakan untuk menguji kecocokan antara model yang diusulkan dengan data aktual. Nilai χ^2 statistik sebaiknya lebih kecil dari nilai χ^2 tabel pada tingkat signifikansi tertentu (Wiyono, 2020). Namun, dalam konteks PLS-SEM, indikator ini jarang dijadikan acuan utama karena pendekatan PLS lebih fokus pada prediksi dibandingkan konfirmasi model.
- Normed Fit Index (NFI), digunakan untuk menilai kesesuaian model dengan membandingkan χ^2 model dengan χ^2 baseline.
 - Nilai NFI mendekati 1 menunjukkan kecocokan model yang baik.
 - Nilai ideal $\geq 0,90$ dianggap sangat baik, nilai $0,80-0,90$ cukup memadai, sedangkan $< 0,80$ menunjukkan model kurang fit (Garson, 2016; Ringle et al., 2024; Santoso & Rahardjo, 2021).
- Goodness of Fit (GoF), mengukur seberapa baik keseluruhan model sesuai dengan data (Haryono, 2016; Wiyono, 2020). GoF dihitung menggunakan rumus:

$$\text{GoF} = \sqrt{\text{rata-rata AVE} \times \text{rata-rata R Square}}$$

Nilai GoF dikategorikan sebagai berikut:

- 0,10 = GoF kecil
 - 0,25 = GoF moderat
 - 0,36 = GoF besar
- Q^2 Predictive Relevance menunjukkan kemampuan prediktif model terhadap konstruk endogen. Nilai Q^2 dihitung menggunakan prosedur PLS Predict. Model dinyatakan memiliki predictive relevance apabila $Q^2 > 0$. Kategorisasi nilai Q^2 menurut (Haryono, 2016; Savitri et al., 2021; Wiyono, 2020):
 - 0,02 = Lemah
 - 0,15 = Sedang
 - 0,35 = Kuat

3.6.2.3 Pengujian Model Struktural (Inner Model)

Pengujian inner model bertujuan untuk menilai kekuatan dan signifikansi hubungan antar konstruk laten dalam model penelitian. Evaluasi dilakukan menggunakan beberapa indikator utama, yakni R-Square, uji signifikansi hipotesis (t-statistic), serta effect size (f^2)

- R-square (R^2) untuk mengukur seberapa besar variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen.
 - Menurut (Hamid & Anwar, 2019; Savitri et al., 2021), nilai R^2 sebesar 0,75 menunjukkan prediksi yang kuat, 0,50 dikategorikan sedang, dan 0,25 termasuk lemah.

- Apabila jumlah variabel independen lebih dari dua, digunakan R-Square Adjusted. (Haryono, 2016), kriteria penilaiannya adalah 0,67 (kuat), 0,33 (sedang), dan 0,19 (lemah).
- Signifikansi hubungan antar konstruk laten, dilakukan melalui metode bootstrapping. Uji ini bertujuan untuk melihat signifikansi hubungan jalur antara variabel bebas terhadap variabel terikat.
 - Hubungan dikatakan signifikan apabila nilai t-statistic $> 1,65$ (signifikansi 10%), $> 1,96$ (signifikansi 5%), atau $> 2,58$ (signifikansi 1%) (Savitri et al., 2021; Wiyono, 2020).

Dalam konteks mediasi, terdapat dua kemungkinan:

- Jika pengaruh langsung ($X \rightarrow Y$) signifikan dan pengaruh tidak langsung ($X \rightarrow M \rightarrow Y$) juga signifikan, maka terjadi partial mediation.
- Jika pengaruh langsung ($X \rightarrow Y$) tidak signifikan, tetapi pengaruh tidak langsung ($X \rightarrow M \rightarrow Y$) signifikan, maka terjadi full mediation.
- Effect Size (f^2) digunakan untuk mengetahui besar kontribusi masing-masing konstruk terhadap variabel dependen. Menurut (Hamid & Anwar, 2019; Sarstedt et al., 2021; Savitri et al., 2021). Nilai f^2 dikategorikan sebagai berikut :
 - $f^2 < 0.02$ (sangat kecil)
 - $0.02 \leq f^2 < 0.15$ (Efek kecil)
 - $0.15 \leq f^2 < 0.35$ (Efek sedang)
 - $f^2 \geq 0.35$ (Efek besar)

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Analisis Deskriptif

Objek penelitian ini adalah masyarakat di Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal, yang merupakan pihak penerima manfaat sekaligus pengawas dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Populasi penelitian mencakup seluruh masyarakat yang berdomisili di wilayah tersebut. Berdasarkan hasil perhitungan menggunakan rumus Slovin, diperoleh jumlah sampel sebanyak 98 responden. Namun, untuk mempermudah proses analisis dan mengantisipasi kemungkinan data yang tidak lengkap, peneliti memperluas jumlah responden menjadi 100 orang.

Responden dipilih dengan kriteria tertentu, antara lain berusia minimal 17 tahun, berdomisili di Kecamatan Kaliwungu, memiliki pengetahuan atau informasi terkait pengelolaan APBD di daerahnya, serta bersedia mengisi kuesioner penelitian. Tidak ada pembatasan jenis kelamin, tingkat pendidikan, atau pekerjaan, sehingga data yang diperoleh diharapkan dapat merepresentasikan kondisi masyarakat secara umum.

Pengumpulan data dilakukan melalui dua metode, yaitu daring dan luring. Untuk metode daring, kuesioner disebarakan melalui aplikasi WhatsApp. Sementara pada metode luring, peneliti bertemu langsung dengan responden, namun proses pengisian tetap dilakukan melalui Google Form menggunakan perangkat responden

atau perangkat yang disediakan peneliti. Dengan demikian, seluruh data yang terkumpul berasal dari format Google Form untuk memudahkan pengolahan dan analisis.

4.1.1.1 Karakteristik Responden

Berdasarkan jumlah sample yang diperoleh yakni sebesar 100 responden, dapat dipaparkan karakteristik dari responden yang berkaitan dengan jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, dapat dilihat pada table-table dibawah ini:

Tabel 4. 1 Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin

jenis kelamin	jumlah	presentase
Laki-laki	45	45%
Perempuan	55	55%
total	100	100%

Berdasarkan Tabel 4.1, responden yang berpartisipasi dalam penelitian ini terdiri dari 45 orang laki-laki (45%) dan 55 orang perempuan (55%). Proporsi responden perempuan sedikit lebih tinggi dibandingkan responden laki-laki. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi dalam penelitian ini relatif seimbang antara kedua jenis kelamin, sehingga data yang diperoleh dapat merepresentasikan pandangan masyarakat secara lebih merata.

Tabel 4. 2 Karakteristik responden berdasarkan usia

Usia (tahun)	Jumlah	Presentase
17-27	84	84%
28-38	15	15%
39-49	1	1%
≥50	0	0%
total	100	100%

Berdasarkan Tabel 4.2, mayoritas responden berada pada rentang usia 17–27 tahun, yaitu sebanyak 84 orang (84%). Kelompok usia ini mendominasi partisipasi dalam penelitian, yang menunjukkan bahwa responden didominasi oleh generasi muda. Selanjutnya, responden berusia 28–38 tahun berjumlah 15 orang (15%), sementara responden pada kelompok usia 39–49 tahun hanya berjumlah 1 orang (1%). Tidak terdapat responden yang berusia ≥ 50 tahun. Dominasi usia muda dalam penelitian ini mengindikasikan bahwa kelompok ini memiliki minat dan partisipasi yang lebih besar dalam isu pengelolaan APBD di wilayah penelitian.

Tabel 4. 3 Karakteristik responden berdasarkan tingkat pendidikan

tingkat pendidikan	jumlah	presentase
SD	0	0%
SMP	0	0%
SMA	25	25%
S1	67	67%
S2	7	7%
S3	1	1%
TOTAL	100	100%

Berdasarkan Tabel 4.3, responden dalam penelitian ini memiliki tingkat pendidikan yang bervariasi. Sebagian besar responden berpendidikan terakhir Sarjana (S1) sebanyak 67 orang (67%). Responden dengan pendidikan terakhir Sekolah Menengah Atas (SMA) berjumlah 25 orang (25%), sementara yang berpendidikan Magister (S2) sebanyak 7 orang (7%). Hanya 1 responden (1%) yang berpendidikan Doktor (S3). Tidak terdapat responden dengan tingkat pendidikan Sekolah Dasar (SD) maupun Sekolah Menengah Pertama (SMP). Secara umum, data ini menunjukkan bahwa mayoritas responden memiliki latar belakang pendidikan

tinggi, sehingga diharapkan dapat memahami pertanyaan kuesioner dengan baik dan memberikan jawaban yang relevan.

4.1.1.2 Deskripsi Variabel

Deskripsi variabel digunakan untuk menggambarkan bagaimana responden menjawab pertanyaan terkait dengan variabel literasi keuangan, transparansi, tata Kelola keuangan, dan kepercayaan masyarakat. Penilaian ini menggunakan analisis indeks untuk mengevaluasi kecenderungan jawaban respondenterhadap masing-masing variabel. Rumus yang digunakan untuk menghitung nilai indeks adalah sebagai berikut:

$$\text{Nilai indeks} = ((\%F1 \times 1) + (\%F2 \times 2) + (\%F3 \times 3) + (\%F4 \times 4) + (\%F5 \times 5)) / 5$$

Keterangan :

1. F1 adalah frekuensi responden yang menjawab 1
2. F2 adalah frekuensi responden yang menjawab 2
3. F3 adalah frekuensi responden yang menjawab 3
4. F4 adalah frekuensi responden yang menjawab 4
5. F5 adalah frekuensi responden yang menjawab 5

Hasil nilai indeks akan berada dalam rentang antara 20 hingga 100, dengan selisih 80. Dengan menggunakan metode three box method, interval nilai dapat diidentifikasi sebagai berikut:

$$1. \text{Nilai indeks maksimum} = (\%F \times 5) / 5 = (100 \times 5) / 5 = 100$$

Angka indeks yang dihasilkan menunjukkan skor 20-100, dengan rentang sebesar 80. Dengan menggunakan kriteria *three box method*, maka nilai interval dapat dihitung dengan cara nilai maksimum dikurangi nilai minimum dan hasilnya dibagi tiga akan menghasilkan nilai interval sebesar 26,6 yang akan digunakan sebagai daftar interpretasi nilai indeks, yang dalam contoh ini Adalah sebagai berikut :

1. $20 - 46,6 = \text{Rendah}$
2. $46,7 - 73,3 = \text{Sedang}$
3. $73,4 - 100 = \text{Tinggi}$

1. Deskripsi Variabel Literasi Keuangan (X1)

Tabel 4. 4 Rekapitulasi hasil statistik deskriptif Literasi Keuangan (X1)

no	indikator	skor					jumlah	indeks
		1	2	3	4	5		
1	Pengetahuan dasar keuangan	0	1	4	58	37	100	86,2
		0	2	2	2	5	431	
2	Kemampuan mengelola keuangan pribadi	1	4	9	50	36	100	83,2
		1	8	7	0	0	416	
3	Pengetahuan produk/layanan keuangan	0	6	6	41	47	100	85,8
		0	2	8	4	5	429	
4	Menilai efektivitas pengelolaan keuangan publik	1	3	4	58	24	100	80,2
				4	23	12		
		1	6	2	2	0	401	
jumlah							335,4	
rata-rata							83,85 atau tinggi	

Sumber : data primer, diolah peneliti 2025

Berdasarkan Tabel 4.4, nilai rata-rata indeks variabel literasi keuangan adalah 83,85, termasuk kategori tinggi. Indikator dengan skor tertinggi adalah Pengetahuan dasar keuangan dengan indeks 86,2, yang menunjukkan bahwa responden memiliki pemahaman yang baik terkait konsep-konsep dasar pengelolaan keuangan. Sementara itu, indikator dengan skor terendah adalah Menilai efektivitas pengelolaan keuangan publik dengan indeks 80,2, yang mengindikasikan bahwa kemampuan responden dalam mengevaluasi efektivitas pengelolaan dana publik masih perlu ditingkatkan. Secara umum, hasil ini menunjukkan bahwa literasi keuangan responden sudah baik, namun keterampilan analisis pada aspek publik perlu diperkuat.

2. Deskripsi Variabel Transparansi (X2)

Tabel 4. 5 Rekapitulasi hasil statistik deskriptif Transparansi (X2)

no	indikator	skor					jumlah	indeks
		1	2	3	4	5		
1	Pelaporan APBDes secara berkala	2	9	11	41	37	100	80,4
		2	18	33	164	185	402	
2	Pelaporan kegiatan desa secara berkala	7	5	21	41	26	100	74,8
		7	10	63	164	130	374	
3	Pelaporan capaian prestasi desa	2	15	12	27	44	100	79,2
		2	30	36	108	220	396	
4	Akses publik terhadap laporan	7	9	14	51	19	100	73,2
		7	18	42	204	95	366	
jumlah								307,6
rata-rata								76,9 atau tinggi

Sumber : data primer, diolah peneliti 2025

3. Deskripsi Variabel Tata Kelola Keuangan (Z)

Tabel 4. 6 Rekapitulasi hasil statistik deskriptif Tata Kelola Keuangan (Z)

no	indikator	skor					jum ah	indeks
		1	2	3	4	5		
1	Laporan penggunaan anggaran terbuka			1				82,6
		0	8	3	37	42	100	
		0	1	3	14	21		
2	Tanggung jawab penggunaan APBD	0	6	9	8	0	413	81
		1	5	9	38	37	100	
		1	1	5	15	18		
3	Pengelolaan sesuai aturan/prosedur	2	1	3	51	33	100	82,4
				3	20	16		
		2	2	9	4	5	412	
4	Efisiensi dan ketepatan sasaran anggaran	1	1	1				77,4
		1	0	7	45	27	100	
		1	2	5	18	13		
jumlah							323,4	

rata-rata	80,85 atau tinggi
-----------	-------------------

Sumber : data primer, diolah peneliti 2025

Berdasarkan Tabel 4.6, variabel Tata Kelola Keuangan memperoleh rata-rata indeks sebesar 80,85 yang termasuk kategori tinggi. Indikator dengan skor tertinggi adalah Laporan penggunaan anggaran terbuka (82,6) yang menunjukkan bahwa pelaporan anggaran telah dilaksanakan dengan tingkat keterbukaan yang baik. Indikator terendah adalah Efisiensi dan ketepatan sasaran anggaran (77,4), yang mengindikasikan masih adanya ruang perbaikan dalam hal optimalisasi penggunaan anggaran agar lebih tepat sasaran dan menghindari pemborosan. Hal ini menunjukkan bahwa tata kelola keuangan sudah berjalan baik, namun efektivitas alokasi dan pemanfaatan anggaran masih menjadi tantangan.

4. Deskripsi Variabel Kepercayaan Masyarakat (Y)

Tabel 4. 7 Rekapitulasi hasil statistik deskriptif Kepercayaan Masyarakat (Y)

no	indikator	skor					jumlah	indeks
		1	2	3	4	5		
1	Pemerintah desa amanah	2	1	1	36	40	100	80,4
		2	0	2	6	4	402	
2	Bekerja untuk kepentingan rakyat	2	8	2	3	44	23	75,6
		2	6	1	6	9	11	
3	Kompetensi pemerintah desa	1	6	9	53	31	100	81,4
		1	2	1	2	21	15	
4	Kepuasan masyarakat	3	8	8	43	28	100	77

		3	1 6	5 4	17 2	14 0	385	
5	Kepatuhan masyarakat terhadap himbauan	1	1	1 0	41	47	100	78,6
		1	2	3 0	16 4	23 5	432	
jumlah								312,6
rata-rata								78,15 atau tinggi

Sumber : data primer, diolah peneliti 2025

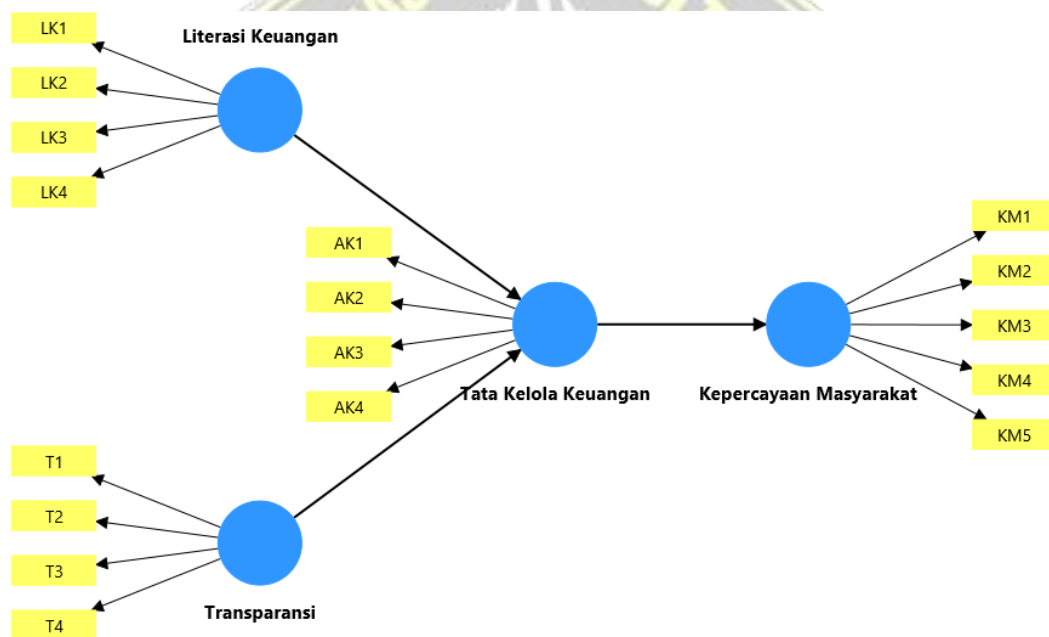
Berdasarkan Tabel 4.7, variabel Kepercayaan Masyarakat memperoleh nilai rata-rata indeks sebesar 78,15 yang termasuk kategori tinggi. Indikator dengan nilai tertinggi adalah Pemerintah desa amanah (80,4), yang mencerminkan persepsi positif masyarakat terhadap integritas pemerintah desa. Sedangkan indikator dengan skor terendah adalah Bekerja untuk kepentingan rakyat (75,6), menunjukkan bahwa sebagian masyarakat masih menilai pemerintah desa belum sepenuhnya memprioritaskan kepentingan publik di atas kepentingan lainnya. Hal ini memberikan sinyal bahwa meskipun kepercayaan masyarakat sudah relatif tinggi, upaya untuk memperlihatkan keberpihakan nyata kepada rakyat perlu terus ditingkatkan.

4.1.2 Analisis Inferensial

Uji inferensial merupakan teknik statistik yang digunakan untuk menarik kesimpulan atau membuat prediksi mengenai suatu populasi berdasarkan data yang diperoleh dari sampel. Tujuannya adalah untuk menentukan apakah hasil yang diperoleh dari sampel dapat digeneralisasi atau diberlakukan pada seluruh populasi atau kelompok yang lebih luas.

Dalam penelitian ini, analisis dilakukan menggunakan perangkat lunak SmartPLS versi 4.1.1.4, yang menerapkan metode Partial Least Square (PLS) untuk menguji hubungan antar variabel dalam model yang kompleks. PLS digunakan karena mampu menganalisis model struktural dengan variabel laten dan indikator yang saling berhubungan secara simultan. Sementara itu, Structural Equation Modeling (SEM) digunakan untuk menguji hubungan sebab-akibat antar variabel-variabel laten yang terlibat dalam penelitian.

Gambar 1 menyajikan model konseptual yang menggambarkan hubungan antar variabel laten yang akan dianalisis dalam penelitian ini.



Gambar 4. 1 Model Latent Variable Penelitian

Dalam pengujian model penelitian, terdapat dua tahapan utama yang dilakukan, yaitu Outer Model dan Inner Model.

Outer Model difokuskan pada evaluasi validitas dan reliabilitas indikator yang digunakan untuk mengukur variabel laten. Pengujian dalam tahap ini meliputi Convergent Validity, Discriminant Validity, dan Construct Reliability untuk memastikan bahwa indikator mampu merepresentasikan konstruk secara akurat dan konsisten.

Sementara itu, Inner Model bertujuan untuk menguji hubungan antar variabel laten, baik dari segi kekuatan hubungan maupun signifikansinya. Evaluasi dilakukan melalui pengujian seperti nilai R^2 (R-Square), koefisien jalur (path coefficient), dan uji signifikansi jalur untuk mengetahui besarnya pengaruh antar konstruk dalam model yang telah dibangun.

1. Outer Model

Outer model berfokus pada hubungan antara variabel laten dan indikator. Pengujian pada outer model bertujuan untuk memastikan bahwa instrumen yang digunakan untuk mengukur variabel laten memiliki validitas dan reliabilitas yang baik. Ada tiga jenis pengujian utama dalam outer model yaitu *Convergent validity*, *Discriminat Validity*, dan *Construct Reliability*.

a. *Convergent Validity*

Convergent Validity memiliki dua kriteria nilai yang dapat dievaluasi, yaitu menggunakan nilai loading factor atau nilai Average Variance Extracted (AVE).

1) Nilai Loading Factor

Output hasil estimasi outer loading diukur dari korelasi antara skor indikator (instrumen) dengan konstruksya (variabel). Indikator dianggap valid jika memiliki nilai korelasi di atas 0,70 atau 0,60 sudah dianggap cukup atau juga 0,50 masih dapat diterima. Apabila ada indikator yang tidak memenuhi syarat ini maka harus dibuang. Adapun hasil *convergent validity* tahap pertama dalam penelitian pada Tabel 1

Tabel 4. 8 Hasil Outer Loading Uji Convergent Validity Tahap 1

	Kepercayaan Masyarakat	Literasi Keuangan	Tata Kelola Keuangan	Transparansi	keterangan
KM1	0.777				valid
KM2	0.683				Valid
KM3	0.796				Valid
KM4	0.609				Valid
KM5	0.156				unvalid
LK1		0.659			Valid
LK2		0.715			Valid
LK3		0.428			unvalid
LK4		0.381			unvalid
AK1			0.682		Valid
AK2			0.652		Valid
AK3			0.483		unvalid
AK4			0.753		Valid
T1				0.843	Valid
T2				0.583	Valid
T3				0.762	Valid
T4				0.605	valid

Berdasarkan hasil uji *convergent validity* tahap pertama, sebagian besar indikator pada variabel penelitian telah memenuhi ambang batas nilai *outer loading* sebesar

0,50, yang menunjukkan adanya korelasi yang cukup kuat antara indikator dengan konstruk yang diukurnya. Namun demikian, terdapat empat indikator yang memiliki nilai di bawah batas minimum tersebut. Indikator KM5 pada variabel Kepercayaan Masyarakat hanya memperoleh nilai *outer loading* sebesar 0,156, indikator LK3 dan LK4 pada variabel Literasi Keuangan masing-masing bernilai 0,428 dan 0,381, serta indikator AK3 pada variabel Tata Kelola Keuangan memiliki nilai 0,483. Keempat indikator ini memiliki nilai yang jauh di bawah standar *outer loading* $\geq 0,50$, sehingga dinilai kurang mampu merepresentasikan konstruk secara memadai. Dengan pertimbangan tersebut, indikator-indikator ini dihapus dari model pengukuran agar kualitas hasil analisis meningkat. Setelah penghapusan dilakukan, pengujian *convergent validity* tahap kedua dilaksanakan untuk memastikan bahwa seluruh indikator yang tersisa telah memenuhi kriteria validitas yang dipersyaratkan. Tabel 2 disajikan hasil pengujian *outer loading* tahap2.

Tabel 4. 9 Hasil Outer Loading Uji Convergent Validity Tahap 2

	Kepercayaan Masyarakat	Literasi Keuangan	Tata Kelola Keuangan	Transparansi	keterangan
KM1	0.786				valid
KM2	0.669				valid
KM3	0.798				valid
KM4	0.645				valid
LK1		0.555			valid
LK2		0.875			valid
AK1			0.701		valid
AK2			0.644		valid
AK4			0.801		valid
T1				0.830	valid
T2				0.592	valid

T3				0.757	valid
T4				0.625	valid

Berdasarkan hasil uji *convergent validity* pada Tabel 2, seluruh indikator yang digunakan dalam penelitian ini telah memenuhi ambang batas nilai *outer loading* sebesar 0,50, sehingga semuanya dinyatakan valid. Pada variabel Kepercayaan Masyarakat, keempat indikator (KM1, KM2, KM3, dan KM4) memiliki nilai *outer loading* antara 0,645 hingga 0,798. Variabel Literasi Keuangan juga valid dengan dua indikator (LK1 dan LK2) yang memiliki nilai masing-masing sebesar 0,555 dan 0,875. Seluruh indikator pada variabel Tata Kelola Keuangan (AK1, AK2, dan AK4) dinyatakan valid dengan nilai berkisar antara 0,644 hingga 0,801. Sementara itu, variabel Transparansi yang terdiri dari empat indikator (T1, T2, T3, dan T4) juga valid dengan nilai *outer loading* antara 0,592 hingga 0,830. Dengan demikian, semua indikator pada tahap kedua ini dapat digunakan dalam model pengukuran karena telah memenuhi kriteria *convergent validity*.

2) Average Variance Extracted (AVE)

Output hasil estimasi average variance extracted (AVE) dapat dilihat pada Tabel 3.

Variabel dikatakan valid jika memiliki nilai average variance extracted (AVE) $\geq 0,5$.

Tabel 4. 10 Hasil AVE Uji Convergent Validity

	Average variance extracted (AVE)	keterangan
Kepercayaan Masyarakat	0.530	valid
Literasi Keuangan	0.537	valid
Tata Kelola Keuangan	0.516	valid
Transparansi	0.501	valid

Berdasarkan hasil uji *convergent validity* menggunakan nilai *Average Variance Extracted* (AVE) pada Tabel 4.10, seluruh variabel memiliki nilai AVE di atas ambang batas minimum 0,50 sehingga semuanya dinyatakan valid. Variabel Literasi Keuangan memiliki nilai AVE tertinggi sebesar 0,537, yang menunjukkan bahwa lebih dari 53% varians indikator dapat dijelaskan oleh konstruk tersebut. Variabel Kepercayaan Masyarakat dan Tata Kelola Keuangan juga valid dengan nilai AVE masing-masing sebesar 0,530 dan 0,516. Sementara itu, variabel Transparansi memiliki nilai AVE sebesar 0,501 yang meskipun berada sangat dekat dengan batas minimum, tetap memenuhi kriteria validitas konvergen. Dengan demikian, seluruh konstruk dalam model telah memenuhi kriteria *convergent validity* berdasarkan nilai AVE, karena masing-masing mampu menjelaskan lebih dari 50% varians indikatornya.

b. Discriminant Validity

Discriminant validity digunakan untuk memastikan bahwa konstruk atau variabel dalam model pengukuran benar-benar mengukur hal yang berbeda atau tidak tumpang tindih satu sama lain. Dengan kata lain, *discriminant validity* mengukur sejauh mana konstruk yang berbeda dalam model pengukuran dapat dibedakan satu sama lain. *Discriminant validity* dapat diukur menggunakan salah satu dari tiga kriteria nilai yang akan dievaluasi, yaitu nilai *cross loading*, *latent variable correlation* dan *Fornell-Larcker*.

1) *Cross loading*

Indikator/ Pernyataan dinyatakan valid jika hubungan indikator/ pernyataan dengan konstruksya/ variabel (nilai cross loading) lebih tinggi dibandingkan dengan hubungannya dengan konstruk yang lain. Berikut ini hasil pengolahan data dengan menggunakan SmartPLS versi 4.1.1.4 dengan hasil cross loading sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 4. 11 Hasil Cross Loading Uji Discriminant Validity Tahap I

	Kepercayaan Masyarakat	Literasi Keuangan	Tata Kelola Keuangan	Transparansi	Keterangan
KM1	0.786	-0.159	0.318	0.316	Valid
KM2	0.669	0.055	0.353	0.364	Valid
KM3	0.798	0.107	0.519	0.271	Valid
KM4	0.645	0.004	0.312	0.299	Valid
LK1	0.097	0.555	0.124	0.246	Valid
LK2	-0.029	0.875	0.214	0.036	Valid
AK1	0.298	0.105	0.701	0.524	Valid
AK2	0.437	0.128	0.644	0.294	Valid
AK4	0.428	0.274	0.801	0.382	Valid
T1	0.404	-0.006	0.498	0.830	Valid
T2	0.083	-0.097	0.202	0.592	Valid
T3	0.273	0.291	0.435	0.757	Valid
T4	0.332	0.162	0.366	0.625	Valid

Berdasarkan hasil uji discriminant validity menggunakan nilai cross loading pada Tabel 4.11, setiap indikator pada variabel penelitian memiliki korelasi yang lebih tinggi dengan konstruksya masing-masing dibandingkan dengan korelasi terhadap konstruk lainnya. Indikator KM1 pada variabel Kepercayaan Masyarakat memiliki nilai cross loading sebesar 0,786 terhadap variabelnya, lebih tinggi dibandingkan nilai korelasinya terhadap variabel lain. Indikator LK2 pada variabel Literasi Keuangan memiliki nilai 0,875 terhadap konstruksya, jauh di atas korelasinya

dengan variabel lain. Pada variabel Tata Kelola Keuangan, indikator AK4 memiliki nilai tertinggi sebesar 0,801 terhadap konstruksya sendiri, sedangkan pada variabel Transparansi, indikator T1 memiliki nilai 0,830. Hasil tersebut menunjukkan bahwa seluruh indikator mampu merepresentasikan konstruk masing-masing secara lebih kuat dibandingkan dengan konstruk lain. Dengan demikian, instrumen penelitian ini telah memenuhi kriteria discriminant validity dan layak digunakan pada tahap analisis berikutnya.

2) Latent variable correlation

Latent variable correlation adalah bagian dari langkah-langkah untuk memeriksa discriminant validity, melihat seberapa besar hubungan antar konstruk dalam model. Korelasi yang tinggi antara konstruk dapat menunjukkan masalah diskriminasi validitas dan multikolinearitas. Output hasil estimasi pada tabel 6 sebagai berikut:

Tabel 4. 12 Nilai Latent Variable Correlation, AVE dan Akar Kuadrat AVE

Variable	Kepercayaan Masyarakat	Literasi Keuangan	Tata Kelola Keuangan	Transparansi	\sqrt{AVE}	keterangan
Kepercayaan Masyarakat	1	0.023	0.538	0.420	0.728	Valid
Literasi Keuangan	0.023	1	0.239	0.150	0.733	Valid
Tata Kelola Keuangan	0.538	0.239	1	0.561	0.718	Valid
Transparansi	0.420	0.150	0.561	1	0.708	Valid

Berdasarkan hasil uji discriminant validity menggunakan pendekatan Fornell-Larcker pada Tabel 4.12, nilai akar kuadrat Average Variance Extracted ($\sqrt{\text{AVE}}$) untuk setiap konstruk lebih besar daripada nilai korelasi antar konstruk pada baris atau kolom yang sama. Hal ini menunjukkan bahwa setiap variabel memiliki diskriminan validitas yang memadai. Variabel Kepercayaan Masyarakat memiliki nilai $\sqrt{\text{AVE}}$ sebesar 0,728, lebih tinggi daripada seluruh korelasi dengan variabel lain, yaitu dengan Literasi Keuangan (0,023), Tata Kelola Keuangan (0,538), dan Transparansi (0,420). Variabel Literasi Keuangan memiliki nilai $\sqrt{\text{AVE}}$ sebesar 0,733, juga lebih besar dibandingkan korelasinya dengan Kepercayaan Masyarakat (0,023), Tata Kelola Keuangan (0,239), dan Transparansi (0,150). Selanjutnya, variabel Tata Kelola Keuangan memiliki nilai $\sqrt{\text{AVE}}$ sebesar 0,718 yang lebih tinggi daripada korelasinya dengan Kepercayaan Masyarakat (0,538), Literasi Keuangan (0,239), dan Transparansi (0,561). Terakhir, variabel Transparansi memiliki nilai $\sqrt{\text{AVE}}$ sebesar 0,708, lebih besar dibandingkan korelasinya dengan Kepercayaan Masyarakat (0,420), Literasi Keuangan (0,150), dan Tata Kelola Keuangan (0,561). Dengan demikian, seluruh variabel penelitian memenuhi kriteria discriminant validity menurut Fornell-Larcker Criterion.

c. Construct

Reliability

Construct Reliability dapat analisis menggunakan salah satu dari dua cara ini, yaitu dengan menganalisis nilai *Cronbach's Alpha* dan *composite reliability*. Kedua cara ini merupakan bagian yang digunakan untuk menguji nilai reliabilitas indikator-indikator pada suatu variabel.

1) Cronbach's

Alpha

Cronbach's Alpha adalah indikator penting dalam menguji reliabilitas variabel dalam model PLS-SEM. Nilai *Cronbach's Alpha* yang tinggi menunjukkan bahwa konstruk/variabel tersebut diukur dengan baik dan konsisten untuk validitas pengukuran dalam analisis PLS. Sebaliknya, jika nilai *Cronbach's Alpha* rendah, ini dapat mengindikasikan bahwa indikator/pernyataan yang digunakan tidak cukup reliabel dan perlu diperbaiki atau diganti.

Tabel 4. 13 Nilai Cronbach's Alpha

variabel	Cronbach's alpha	keterangan
Kepercayaan Masyarakat	0.708	reliable
Literasi Keuangan	0.153	Unreliable
Tata Kelola Keuangan	0.524	unreliable
Transparansi	0.671	reliable

Berdasarkan Tabel 4.13, hasil uji reliabilitas menggunakan Cronbach's Alpha menunjukkan variasi tingkat konsistensi instrumen antarvariabel. Variabel Kepercayaan Masyarakat memiliki nilai Cronbach's Alpha sebesar 0.708, yang berada di atas ambang batas minimum 0,60, sehingga dapat dinyatakan reliabel. Hal yang sama juga ditunjukkan oleh variabel Transparansi dengan nilai 0.671, yang menegaskan bahwa instrumen pengukuran pada variabel ini konsisten dan dapat diandalkan. Sebaliknya, variabel Literasi Keuangan memperoleh nilai 0.153, jauh di bawah batas minimum, sehingga dinyatakan tidak reliabel. Hal ini mengindikasikan bahwa item pertanyaan pada variabel tersebut belum mampu mengukur konstruk secara konsisten. Kondisi serupa juga terlihat pada variabel Tata Kelola Keuangan yang memiliki nilai 0.524, yang masih berada di bawah

ambang batas, sehingga juga dinyatakan tidak reliabel. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dari keempat variabel yang diuji, hanya dua variabel yang memenuhi kriteria reliabilitas, yaitu Kepercayaan Masyarakat dan Transparansi. Sementara itu, Literasi Keuangan dan Tata Kelola Keuangan perlu dilakukan perbaikan instrumen atau penyusunan ulang indikator agar mampu memberikan hasil pengukuran yang konsisten dan dapat dipertanggungjawabkan dalam analisis selanjutnya.

2) Composite reliability

Composite Reliability digunakan untuk memastikan konsistensi internal dari indikator-indikator yang membentuk variabel laten. Dalam Smart PLS, *Composite Reliability* adalah alat utama untuk mengukur reliabilitas, dan nilai $CR \geq 0,7$ dianggap memenuhi standar untuk penelitian.

Tabel 4. 14 Nilai Composite Reliability

variabel	Composite reliability (rho_c)	keterangan
Kepercayaan Masyarakat	0.817	Reliable
Literasi Keuangan	0.688	Unreliable
Tata Kelola Keuangan	0.760	Reliable
Transparansi	0.798	Reliable

Berdasarkan Tabel 4.14, seluruh variabel dalam model memiliki nilai *Composite Reliability* di atas ambang batas minimum 0,70, sehingga dinyatakan *reliable*. Nilai ini menunjukkan bahwa indikator-indikator pada masing-masing konstruk/variabel memiliki konsistensi yang sangat baik dalam mengukur variabel. Uji Composite Reliability memperlihatkan bahwa Kepercayaan Masyarakat (0.817), Tata Kelola

Keuangan (0.760), dan Transparansi (0.798) reliabel karena melebihi ambang batas 0,70. Namun, Literasi Keuangan (0.688) dinyatakan tidak reliabel karena tidak memenuhi kriteria yang dipersyaratkan.

d. Uji Model Fit

uji model fit dilakukan dengan melihat hasil estimasi output SmartPLS versi 4.1.1.4 dibandingkan dengan kriteria penjelasan pada tabel berikut

Tabel 4. 15 Hasil Uji Model Fit

parameter	Nilai parameter	Keterangan
SRMR	0.126	Tidak Fit
Chi-square	227.230	Tidak Fit
NFI	0.383	Kurang Fit
GoF	0.404	Fit Kuat
Q² Predict Relative	Q ² Kepercayaan Masyarakat $0.125 > 0$ Q ² Tata Kelola Keuangan $0.271 > 0$	Prediktif Kuat

Berdasarkan tabel uji model fit yang telah dilakukan dalam penelitian ini didapatkan data bahwa model ini dapat digunakan untuk menganalisis hubungan antar variabel laten dengan keyakinan bahwa model mencerminkan data secara akurat dan memiliki kemampuan prediktif yang relevan:

1. SRMR (*Standardized Root Mean Square Residual*)

SRMR menunjukkan selisih standar antara matriks korelasi yang diobservasi dan diprediksi. Nilai SRMR yang baik adalah $< 0,10$, sedangkan idealnya $> 0,08$. Hasil penelitian menunjukkan nilai SRMR sebesar 0.126,

yang melebihi ambang batas, sehingga model dinyatakan tidak fit pada indikator ini.

2. Chi Square (χ^2)

Chi-square mengukur perbedaan antara matriks kovarian estimasi model dengan data aktual. Model dinyatakan fit apabila nilai χ^2 model lebih kecil daripada χ^2 tabel. Dalam penelitian ini, nilai χ^2 sebesar 227.230, lebih besar dibandingkan nilai tabel, sehingga model dinyatakan tidak fit secara statistik.

3. NFI (Normed Fit Index)

NFI digunakan untuk membandingkan kecocokan model dengan model dasar (null model). Nilai ideal $NFI \geq 0,90$. Hasil penelitian menunjukkan nilai NFI sebesar 0.383, yang jauh di bawah kriteria minimum, sehingga model dikategorikan kurang fit.

4. GoF (Goodness of Fit)

Indeks yang menggabungkan kualitas outer model dan inner model sebagai ukuran kesesuaian keseluruhan model. Kategori interpretasinya adalah 0,10 (rendah), 0,25 (sedang), dan 0,36 (tinggi/kuat). Hasil penelitian menunjukkan nilai GoF sebesar 0.404, yang lebih tinggi dari 0,36, sehingga model dapat dikatakan memiliki kesesuaian yang kuat.

5. Q^2 Predictive Relevance

Menunjukkan seberapa baik model dapat memprediksi indikator-indikator dari konstruk endogen. Jika nilai $Q^2 > 0$, maka model memiliki relevansi

prediktif, dengan interpretasi 0,02 (lemah), 0,15 (sedang), dan 0,35 (kuat). Hasil penelitian menunjukkan nilai Q^2 untuk Kepercayaan Masyarakat sebesar 0.125 dan Tata Kelola Keuangan sebesar 0.271, keduanya > 0 , sehingga dapat disimpulkan bahwa model memiliki kemampuan prediktif yang kuat.

2. Inner Model

Inner model dalam PLS-SEM menggambarkan hubungan antar variabel laten dan dievaluasi untuk melihat kekuatan serta signifikansi hubungan tersebut. Evaluasinya mencakup tiga aspek utama: **R Square**, signifikansi hubungan (Pengujian Hipotesis), dan **f Square / Effect Size**.

a. R Square (R^2)

R-Square dalam PLS-SEM mengukur seberapa baik variabel independen laten dalam model dapat menjelaskan variabilitas variabel dependen laten. Nilai R^2 menunjukkan kekuatan prediktif model secara keseluruhan.

Nilai R^2 berkisar dari 0 hingga 1, di mana nilai yang lebih tinggi menunjukkan model yang lebih baik dalam menjelaskan variansi.

Berikut nilai R-Square dalam analisis ini.

Tabel 4. 16 Hasil Uji R Square (R^2)

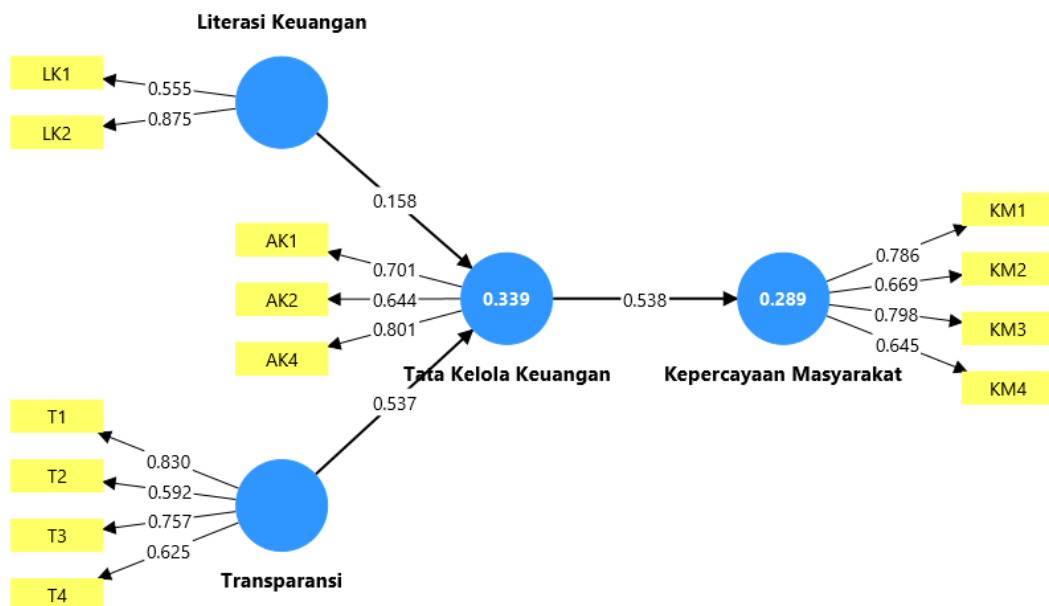
variable	R-square	R-square adjusted
Kepercayaan Masyarakat	0.289	0.282
Tata Kelola Keuangan	0.339	0.325

Hasil uji R^2 menunjukkan bahwa variabel Kepercayaan Masyarakat memiliki nilai sebesar 0.289. Berdasarkan kriteria penilaian, nilai ini berada di atas 0.25 namun di bawah 0.50, sehingga dapat dikategorikan moderate atau sedang. Hal ini berarti konstruk independen dalam model mampu menjelaskan 28,9% variasi pada Kepercayaan Masyarakat, sedangkan sisanya 71,1% dijelaskan oleh faktor lain di luar model.

Sementara itu, variabel Tata Kelola Keuangan memperoleh nilai R^2 sebesar 0.339, yang juga berada pada kategori moderate, karena melebihi batas 0.25 tetapi belum mencapai 0.50. Artinya, variabel-variabel independen dalam model menjelaskan 33,9% variasi pada Tata Kelola Keuangan, sementara 66,1% sisanya dipengaruhi faktor eksternal di luar model.

Dengan demikian, kedua variabel dependen pada penelitian ini memiliki tingkat kemampuan prediktif yang cukup/moderat, yang menunjukkan bahwa model dapat menjelaskan sebagian varians konstruk, namun masih menyisakan ruang bagi variabel lain di luar model untuk berkontribusi.

Berikut gambar output PLS-SEM Algorithm untuk melihat R^2 model penelitian.



Gambar 4. 2 Output model PLS SEM Algorithm

b. Effect size (F^2)

Effect size (F^2) digunakan untuk mengevaluasi dampak spesifik variabel independen terhadap prediksi variabel dependen. Pengukuran ini dilakukan dengan melihat perubahan nilai R^2 setelah variabel independen tertentu dihilangkan dari model. Nilai F^2 diinterpretasikan sebagai berikut: $f^2 < 0,02$ (sangat kecil), $0,02 < f^2 < 0,15$ (efek kecil), $0,15 < f^2 < 0,35$ (efek sedang), $f^2 > 0,35$ (efek besar). Dengan menghitung f^2 , peneliti dapat mengidentifikasi variabel independen mana yang memiliki pengaruh paling besar terhadap variabel dependen dalam model, sehingga memberikan wawasan lebih dalam tentang dinamika hubungan antar variabel laten.

Tabel 4. 17 Hasil Uji Effect size (f^2)

	Kepercayaan Masyarakat	Literasi Keuangan	Tata Kelola Keuangan	Transparansi
--	------------------------	-------------------	----------------------	--------------

Kepercayaan Masyarakat				
Literasi Keuangan			0.037	
Tata Kelola Keuangan	0.407			
Transparansi			0.426	

Berdasarkan hasil Tabel 4.17 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Literasi Keuangan terhadap Tata Kelola Keuangan

Nilai $f^2 = 0.037$ termasuk kategori efek kecil ($0.02 < f^2 < 0.15$). Hal ini menunjukkan bahwa literasi keuangan memang memberikan kontribusi terhadap tata kelola keuangan, namun pengaruhnya relatif terbatas. Dengan kata lain, peningkatan literasi keuangan tidak secara dominan memperbaiki praktik tata kelola, meskipun tetap memiliki peran yang berarti.

2. Tata Kelola Keuangan terhadap Kepercayaan Masyarakat

Nilai $f^2 = 0.407$ berada dalam kategori efek besar ($f^2 > 0.35$). Artinya, tata kelola keuangan menjadi faktor yang sangat kuat dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat. Semakin baik tata kelola keuangan yang dijalankan, semakin tinggi pula tingkat kepercayaan publik terhadap organisasi/perusahaan.

3. Transparansi terhadap Tata Kelola Keuangan

Nilai $f^2 = 0.426$ juga termasuk kategori efek besar. Hal ini menunjukkan bahwa transparansi memiliki pengaruh dominan dalam membentuk dan memperkuat tata kelola keuangan. Keterbukaan informasi dan kejelasan pelaporan keuangan

berkontribusi signifikan dalam menciptakan sistem tata kelola yang lebih akuntabel.

c. Signifikansi (Pengujian Hipotesis)

Uji signifikansi hubungan dalam PLS-SEM dilakukan untuk menentukan apakah hubungan antar variabel laten dalam model dapat dianggap signifikan secara statistik. Proses ini menggunakan teknik *bootstrapping*, di mana data di-*resampling* untuk menghitung nilai koefisien jalur (*path coefficient*) dan kesalahan standarnya. Hasilnya dalam bentuk nilai *t-statistic* atau *p-value*. Sebuah hubungan dianggap signifikan jika *p-value* lebih kecil dari tingkat signifikansi yang telah ditentukan (dalam penelitian ini menggunakan signifikansi 0,05). Koefisien jalur yang signifikan menunjukkan bahwa hubungan antara variabel independen dan dependen laten memiliki dukungan statistik yang kuat, sehingga hipotesis yang diajukan dapat diterima. Berikut hasil *bootstrapping* model penelitian *direct effect* dan *indirect effect*.

1) Hasil *bootstrapping* efek langsung (*direct effect*)

Hasil *bootstrapping* efek langsung (*direct effect*) dapat dilihat pada Tabel 11 sebagai berikut:

Tabel 4. 18 Hasil Path Coefficient Bootstrapping direct effect

	Original sample (O)	T statistics (O/STDEV)	P values	keterangan
(H1) Literasi Keuangan ->	0.158	1.661	0.097	TIDAK TERBUKTI

Tata Kelola Keuangan				
(H3) Tata Kelola Keuangan -> Kepercayaan Masyarakat	0.538	6.223	0.000	TERBUKTI
(H2) Transparansi -> Tata Kelola Keuangan	0.537	7.168	0.000	TERBUKTI

1 Pengaruh Literasi Keuangan terhadap Tata Kelola Keuangan

Jalur ini memiliki koefisien sebesar 0.158, dengan T-statistik 1.661 dan p-value 0.097 ($> 0,05$). Hal ini menunjukkan bahwa literasi keuangan tidak berpengaruh signifikan terhadap tata kelola keuangan. Dengan demikian, hipotesis 1 tidak terbukti secara statistik.

2 Pengaruh Tata Kelola Keuangan terhadap Kepercayaan Masyarakat

Hasil pengujian menunjukkan nilai koefisien sebesar 0.538, dengan T-statistik 6.223 dan p-value 0.000 ($< 0,05$). Artinya, tata kelola keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepercayaan masyarakat. Semakin baik tata kelola keuangan yang diterapkan, semakin tinggi pula tingkat kepercayaan masyarakat. Hipotesis 3 ini terbukti secara statistik.

3 Pengaruh Transparansi terhadap Tata Kelola Keuangan

Koefisien jalur sebesar 0.537, dengan T-statistik 7.168 dan p-value 0.000 ($< 0,05$). Hasil ini menunjukkan bahwa transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap tata kelola keuangan. Semakin tinggi transparansi yang dilakukan,

semakin kuat tata kelola keuangan yang terbentuk. Hipotesis 2 ini terbukti secara statistik.

2) Hasil **bootstrapping** efek tidak langsung (**Indirect effect**)

Hasil *bootstrapping* efek tidak langsung (*Indirect effect*) dapat dilihat pada Tabel 12 sebagai berikut:

Tabel 4. 19 Hasil Path Coefficient Bootstrapping Indirect effect

	Original sample (O)	T statistics (O/STDEV)	P values	keterangan
(H4) Transparansi -> Tata Kelola Keuangan -> Kepercayaan Masyarakat	0.289	4.039	0.000	Terbukti
(H5) Literasi Keuangan -> Tata Kelola Keuangan -> Kepercayaan Masyarakat	0.085	1.601	0.109	Tidak terbukti

- 1 Pengaruh Transparansi terhadap Kepercayaan Masyarakat melalui Tata Kelola Keuangan

Hasil analisis jalur tidak langsung menunjukkan bahwa tata kelola keuangan berhasil memediasi hubungan antara transparansi dan kepercayaan masyarakat. Hal ini ditunjukkan oleh nilai koefisien sebesar 0.289, dengan T-statistik 4.039 dan p-value 0.000, yang berarti pengaruh tidak langsung tersebut positif dan signifikan secara statistik (Hipotesis 4 diterima). Temuan ini mengindikasikan bahwa semakin

transparan pengelolaan informasi keuangan, maka melalui tata kelola keuangan yang baik, tingkat kepercayaan masyarakat akan meningkat. Dengan kata lain, tata kelola keuangan berperan penting sebagai jembatan yang mengubah transparansi menjadi kepercayaan publik yang lebih kuat.

2 Pengaruh Literasi Keuangan terhadap Kepercayaan Masyarakat melalui Tata Kelola Keuangan

Jalur mediasi kedua menunjukkan bahwa literasi keuangan tidak memiliki pengaruh tidak langsung yang signifikan terhadap kepercayaan masyarakat melalui tata kelola keuangan, dengan nilai koefisien 0.085, T-statistik 1.601, dan p-value 0.109 (Hipotesis 5 ditolak). Artinya, literasi keuangan masyarakat tidak cukup berkontribusi pada peningkatan kepercayaan publik ketika dimediasi oleh tata kelola keuangan. Hal ini dapat disebabkan oleh persepsi masyarakat yang belum sepenuhnya mengaitkan pemahaman keuangan pribadi atau publik dengan mekanisme tata kelola yang dilakukan pemerintah, sehingga peningkatan literasi keuangan belum otomatis menghasilkan peningkatan kepercayaan masyarakat melalui jalur tata kelola keuangan.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Pengaruh Literasi Keuangan Terhadap Tata Kelola Keuangan

Berdasarkan hasil uji, literasi keuangan terbukti tidak berpengaruh signifikan terhadap tata kelola keuangan pemerintah daerah. Hasil ini mengindikasikan bahwa pemahaman individu terhadap konsep keuangan seperti penganggaran, pencatatan, dan perencanaan belum mampu secara nyata diterjemahkan ke dalam praktik tata

kelola yang transparan, akuntabel, dan efisien. Dalam konteks penyusunan dan implementasi APBD, kualitas tata kelola lebih banyak ditentukan oleh mekanisme regulasi, sistem pengawasan, serta kepatuhan pada prosedur administratif, dibandingkan dengan kemampuan literasi personal aparatur. Dengan kata lain, meskipun aparatur memiliki pengetahuan mengenai pengelolaan keuangan, faktor kelembagaan dan birokrasi tetap menjadi penentu utama terciptanya tata kelola yang baik. Hal ini memperlihatkan bahwa literasi keuangan tidak serta-merta dapat meningkatkan kualitas tata kelola keuangan apabila tidak diiringi dengan sistem kontrol yang kuat.

Dalam teori agensi, hasil ini menjelaskan bahwa literasi keuangan tidak cukup untuk mengurangi konflik keagenan antara agen (aparatur pemerintah) dan prinsipal (masyarakat). Teori agensi menekankan bahwa konflik muncul akibat adanya perbedaan kepentingan serta asimetri informasi. Pengetahuan keuangan yang dimiliki agen memang dapat mengurangi kesenjangan informasi, namun tidak otomatis mengubah perilaku agen agar selalu berpihak pada kepentingan prinsipal. Aparatur yang melek finansial sekalipun tetap memiliki potensi bertindak oportunistik ketika mekanisme transparansi dan akuntabilitas belum berjalan optimal. Oleh sebab itu, literasi keuangan harus dilihat sebagai faktor pendukung, bukan faktor penentu utama. Keberhasilan tata kelola lebih bergantung pada keberadaan sistem pelaporan, audit internal, serta regulasi yang memaksa agen bertindak sesuai kepentingan publik.

Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan (Maria Florensa et al., 2024), dan (Purwidiyanti & Tubastuvi, 2019), yang sama-sama menemukan bahwa literasi

keuangan tidak berpengaruh terhadap praktik pengelolaan keuangan. Temuan-temuan tersebut memperkuat bahwa pengetahuan finansial belum tentu menghasilkan perilaku pengelolaan yang lebih baik, karena terdapat variabel lain seperti pengalaman, sikap, dan lingkungan kelembagaan yang lebih menentukan. Namun demikian, hasil ini bertentangan dengan (Meityas et al., 2025) dan (Rosalia et al., 2025) yang menemukan bahwa literasi keuangan berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan pribadi generasi sandwich maupun milenial. Perbedaan tersebut dapat dijelaskan melalui konteks: pada level personal, literasi keuangan berkaitan langsung dengan pengambilan keputusan sehari-hari sehingga dampaknya lebih nyata, sedangkan pada level tata kelola publik, keputusan tidak hanya diambil individu, tetapi melibatkan sistem birokrasi dan mekanisme politik yang kompleks. Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan bahwa hipotesis H1 tidak terbukti, dan kualitas tata kelola lebih ditentukan oleh sistem kelembagaan dibanding sekadar literasi keuangan aparatur.

4.2.2 Pengaruh Transparansi Terhadap Tata Kelola Keuangan

Berdasarkan hasil uji, transparansi terbukti berpengaruh signifikan terhadap tata kelola keuangan pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa keterbukaan informasi dalam proses perencanaan, penganggaran, dan pelaporan keuangan dapat meningkatkan kualitas tata kelola yang lebih akuntabel dan efisien. Praktiknya, transparansi mendorong pemerintah daerah untuk menyajikan data keuangan secara terbuka kepada publik, sehingga setiap alokasi dana maupun hasil pelaksanaan anggaran dapat diawasi langsung oleh masyarakat maupun lembaga pengawas. Kondisi ini bukan hanya memperkuat akuntabilitas, tetapi juga memaksa aparatur

bertindak lebih hati-hati dalam mengambil keputusan, karena setiap kebijakan dapat dipantau dan dipertanyakan.

Dalam perspektif teori agensi, hasil ini memperlihatkan bahwa transparansi adalah salah satu mekanisme paling efektif untuk mengurangi konflik keagenan. Konflik yang muncul karena adanya asimetri informasi dapat diminimalisir ketika agen diwajibkan membuka informasi keuangan secara jelas kepada prinsipal. Dengan akses informasi yang memadai, masyarakat sebagai prinsipal dapat melakukan pengawasan langsung terhadap agen, sehingga ruang bagi aparatur untuk bertindak oportunistik semakin terbatas. Transparansi pada akhirnya berfungsi sebagai instrumen kontrol yang mengikat agen agar tindakannya selaras dengan kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, temuan ini mempertegas relevansi teori agensi dalam menjelaskan pentingnya keterbukaan informasi sebagai jembatan antara kepentingan agen dan prinsipal.

Temuan penelitian ini sejalan dengan (Gedeona, 2020) yang menunjukkan bahwa keterbukaan anggaran mampu mengurangi potensi korupsi hingga 30% di beberapa daerah di Indonesia. Hasil ini juga didukung oleh (Judijanto et al., 2024) yang menemukan bahwa transparansi meningkatkan kepercayaan publik serta partisipasi masyarakat dalam proses penganggaran. Di sisi lain, beberapa penelitian seperti (Firmansyah et al., 2022) juga menegaskan bahwa transparansi dan literasi keuangan berkontribusi signifikan dalam mendorong akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Dengan demikian, hipotesis H2 dalam penelitian ini terbukti, dan hasilnya menegaskan bahwa transparansi merupakan fondasi penting dalam memperkuat tata kelola keuangan daerah.

4.2.3 Pengaruh Tata Kelola Keuangan Terhadap Kepercayaan Masyarakat

Berdasarkan hasil uji, tata kelola keuangan berpengaruh signifikan terhadap kepercayaan masyarakat. Hasil ini mengindikasikan bahwa ketika pemerintah daerah mampu menyusun, melaksanakan, serta melaporkan anggaran dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi, maka tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah akan meningkat. Praktiknya, tata kelola yang baik tercermin dari penyusunan APBD yang realistis, pelaksanaan anggaran yang disiplin, serta pelaporan yang jelas dan tepat waktu. Kondisi ini memberi keyakinan kepada masyarakat bahwa dana publik dikelola secara profesional dan sesuai dengan kepentingan umum.

Dari perspektif teori agensi, hasil ini selaras dengan pandangan bahwa tata kelola keuangan yang baik dapat mengurangi potensi konflik keagenan. Ketika mekanisme tata kelola diterapkan secara konsisten, agen dipaksa untuk bertindak sesuai dengan kontrak yang ditetapkan dan tidak memiliki keleluasaan untuk menyalahgunakan sumber daya publik. Tata kelola yang efektif menjadi instrumen kontrol yang meminimalisir perilaku oportunistik, sekaligus mempersempit ruang asimetri informasi. Hal ini membuat masyarakat sebagai prinsipal lebih percaya terhadap kinerja agen, karena keputusan keuangan yang diambil dianggap selaras dengan kepentingan publik. Dengan demikian, tata kelola keuangan yang kuat merupakan jembatan penting antara agen dan prinsipal dalam konteks pemerintahan daerah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan (Judijanto et al., 2024) yang menemukan bahwa tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel berpengaruh signifikan

terhadap tingkat kepercayaan masyarakat. Temuan ini juga diperkuat oleh (Pah, 2025) yang menegaskan bahwa tata kelola yang baik meningkatkan kepercayaan publik pada organisasi non-profit, terutama ketika laporan keuangan disajikan secara terbuka. Kesamaan temuan pada berbagai konteks menunjukkan bahwa prinsip tata kelola yang baik bersifat universal dalam membangun kepercayaan. Oleh karena itu, hipotesis H3 dalam penelitian ini terbukti, dan hasilnya menegaskan pentingnya penerapan tata kelola keuangan untuk memperkuat legitimasi pemerintah daerah di mata masyarakat.

4.2.4 Pengaruh Transparansi terhadap Kepercayaan Masyarakat melalui Tata Kelola Keuangan

Berdasarkan hasil uji, transparansi berpengaruh signifikan terhadap kepercayaan masyarakat melalui tata kelola keuangan. Hasil ini menunjukkan bahwa keterbukaan informasi tidak hanya berdampak langsung pada akuntabilitas pengelolaan anggaran, tetapi juga secara tidak langsung memperkuat kepercayaan publik ketika diintegrasikan dalam sistem tata kelola yang baik. Praktiknya, transparansi memungkinkan masyarakat untuk mengawasi perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan APBD, sehingga menimbulkan persepsi bahwa pemerintah bertindak jujur dan profesional. Ketika tata kelola berjalan dengan prinsip keterbukaan, masyarakat akan lebih percaya bahwa dana publik digunakan sesuai dengan kepentingan bersama.

Dalam kerangka teori agensi, transparansi yang dipraktikkan melalui tata kelola keuangan berperan sebagai mekanisme kontrol yang efektif untuk menekan perilaku oportunistik agen. Asimetri informasi yang biasanya menjadi sumber

konflik dapat dikurangi melalui keterbukaan, yang kemudian diterjemahkan dalam praktik tata kelola yang lebih akuntabel. Dengan tata kelola sebagai jembatan, transparansi menjadi instrumen yang memastikan agen bertindak sesuai dengan kontrak sosial yang disepakati dengan prinsipal. Artinya, transparansi memperkuat fungsi pengawasan masyarakat, sementara tata kelola menjamin bahwa pengelolaan keuangan dilakukan sesuai aturan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Hasil penelitian ini konsisten dengan temuan (Nurritziana et al., 2017; Rahmawati., 2013) yang menunjukkan bahwa transparansi laporan keuangan daerah meningkatkan akuntabilitas sekaligus kepercayaan publik. Hasil ini juga diperkuat oleh (Rizki & Wulandari, 2022) menemukan bahwa literasi keuangan yang baik di kalangan aparatur memperkuat pengambilan keputusan, yang dalam praktiknya semakin relevan ketika dikombinasikan dengan keterbukaan informasi. Dengan demikian, hipotesis H4 terbukti, dan hasil penelitian ini mempertegas bahwa transparansi yang diimplementasikan dalam tata kelola adalah kunci untuk meningkatkan legitimasi pemerintah di mata masyarakat.

4.2.5 Pengaruh Literasi Keuangan terhadap Kepercayaan Masyarakat melalui Tata Kelola Keuangan

Berdasarkan hasil uji, literasi keuangan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepercayaan masyarakat melalui tata kelola keuangan. Temuan ini menunjukkan bahwa pemahaman aparatur mengenai konsep keuangan tidak secara otomatis memperkuat kepercayaan masyarakat, meskipun tata kelola dijadikan variabel mediasi. Dalam praktiknya, masyarakat lebih menilai kualitas tata kelola dari aspek transparansi, kepatuhan pada aturan, dan hasil implementasi anggaran,

dibandingkan tingkat literasi yang dimiliki oleh aparatur. Artinya, literasi keuangan tidak cukup untuk mendorong peningkatan kepercayaan publik apabila tidak diiringi mekanisme tata kelola yang efektif dan dapat diawasi.

Jika dilihat dari teori agensi, hasil ini menegaskan bahwa literasi keuangan bukan instrumen utama dalam mengurangi konflik keagenan. Konflik antara agen dan prinsipal muncul bukan semata karena kurangnya pemahaman agen, tetapi karena adanya peluang untuk bertindak oportunistik akibat lemahnya mekanisme pengawasan. Literasi keuangan memang dapat membantu agen memahami risiko dan manfaat suatu kebijakan, namun tanpa tata kelola yang akuntabel, aparatur tetap memiliki ruang untuk mengutamakan kepentingan sendiri. Oleh sebab itu, dalam kerangka teori agensi, literasi keuangan hanya berfungsi sebagai faktor pendukung, sementara kepercayaan publik lebih ditentukan oleh efektivitas tata kelola dan transparansi yang dijalankan.

Hasil penelitian ini konsisten dengan (Ronikeusumaranda et al., 2024) yang menemukan bahwa literasi keuangan tidak berpengaruh signifikan terhadap perilaku tata kelola maupun kepuasan keuangan, sedangkan sikap keuangan dan praktik tata kelola memiliki pengaruh yang lebih dominan. Sebaliknya, hasil ini berbeda dengan (Putra, 2020) yang menyatakan bahwa literasi keuangan masyarakat berkontribusi pada meningkatnya kepercayaan terhadap pemerintah, karena masyarakat mampu menilai kinerja keuangan secara lebih kritis. Perbedaan ini dapat dijelaskan melalui konteks: literasi keuangan memang berperan penting di tingkat masyarakat sebagai prinsipal, tetapi tidak selalu efektif di tingkat aparatur sebagai agen. Dengan demikian, hipotesis H5 dalam penelitian ini tidak terbukti,

dan hasilnya menegaskan bahwa kepercayaan masyarakat lebih dibangun melalui transparansi dan tata kelola yang baik dibanding literasi keuangan aparatur.



BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh literasi keuangan dan transparansi terhadap tata kelola keuangan serta implikasinya terhadap kepercayaan masyarakat dengan menggunakan teori agensi sebagai landasan teoretis. Data penelitian diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada responden di Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal, dan diolah menggunakan analisis statistik inferensial. Hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh yang berbeda pada setiap variabel, baik yang mendukung hipotesis maupun yang tidak.

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan, maka kesimpulan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Literasi keuangan tidak berpengaruh signifikan terhadap tata kelola keuangan pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman keuangan aparatur belum secara nyata mampu diterjemahkan dalam praktik tata kelola yang akuntabel dan transparan. Namun demikian, hasil uji mediasi mengungkapkan bahwa literasi keuangan tetap berperan secara tidak langsung melalui tata kelola keuangan, yang kemudian berpengaruh signifikan terhadap kepercayaan masyarakat. Temuan ini menegaskan pentingnya tata kelola sebagai variabel perantara dalam mengoptimalkan pengaruh literasi keuangan.

2. Transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap tata kelola keuangan pemerintah daerah. Artinya, keterbukaan informasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan keuangan mampu meningkatkan akuntabilitas serta memperkuat kualitas tata kelola.
3. Tata kelola keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepercayaan masyarakat. Semakin baik tata kelola yang diterapkan pemerintah daerah, semakin tinggi pula tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah.
4. Transparansi berpengaruh signifikan terhadap kepercayaan masyarakat melalui tata kelola keuangan. Hal ini membuktikan bahwa keterbukaan informasi yang diintegrasikan dengan sistem tata kelola yang baik dapat memperkuat legitimasi dan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.
5. Literasi keuangan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepercayaan masyarakat melalui tata kelola keuangan. Akan tetapi, hasil uji mediasi menunjukkan bahwa literasi keuangan dapat berkontribusi terhadap kepercayaan publik ketika dimediasi oleh tata kelola keuangan. Dengan kata lain, literasi keuangan saja tidak cukup untuk membangun kepercayaan masyarakat, tetapi menjadi relevan ketika dihubungkan dengan tata kelola yang baik.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan, antara lain:

1. Ruang lingkup penelitian hanya terbatas pada Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal, sehingga hasil penelitian belum dapat digeneralisasikan untuk seluruh pemerintah daerah.
2. Variabel yang digunakan masih terbatas pada literasi keuangan, transparansi, tata kelola keuangan, dan kepercayaan masyarakat. Faktor lain seperti budaya organisasi, motivasi aparatur, maupun peran pengawasan eksternal belum dimasukkan ke dalam model penelitian.
3. Instrumen penelitian berupa kuesioner dapat menimbulkan bias persepsi responden karena bergantung pada pemahaman subjektif, bukan data observasi langsung terkait praktik pengelolaan keuangan.
4. Analisis data menggunakan pendekatan cross-sectional sehingga belum mampu menangkap dinamika perubahan perilaku atau pengaruh variabel dari waktu ke waktu.

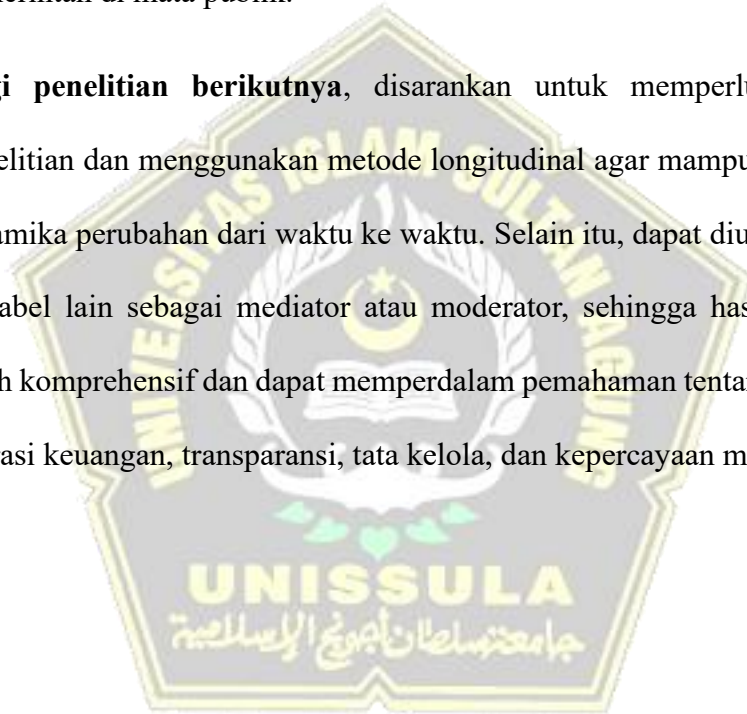
5.3 Saran

Berdasarkan temuan dan keterbatasan penelitian, maka saran yang dapat diajukan adalah sebagai berikut:

1. **Bagi pemerintah daerah**, perlu adanya program peningkatan literasi keuangan aparatur yang diintegrasikan langsung dengan praktik tata kelola keuangan. Dengan demikian, literasi keuangan tidak hanya menjadi pemahaman konseptual, tetapi juga berdampak nyata dalam meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kepercayaan masyarakat. Penelitian selanjutnya dapat memperluas ruang lingkup dan menambahkan variabel

seperti budaya organisasi atau akuntabilitas publik untuk memperkuat temuan ini.

2. **Bagi masyarakat**, peningkatan literasi keuangan perlu terus dilakukan agar masyarakat lebih kritis dalam memahami laporan dan kebijakan keuangan pemerintah. Hal ini memungkinkan masyarakat berperan aktif dalam mengawasi tata kelola keuangan daerah, sekaligus memperkuat legitimasi pemerintah di mata publik.
3. **Bagi penelitian berikutnya**, disarankan untuk memperluas wilayah penelitian dan menggunakan metode longitudinal agar mampu menangkap dinamika perubahan dari waktu ke waktu. Selain itu, dapat diuji juga peran variabel lain sebagai mediator atau moderator, sehingga hasil penelitian lebih komprehensif dan dapat memperdalam pemahaman tentang hubungan literasi keuangan, transparansi, tata kelola, dan kepercayaan masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

- Asten, S. O., Suhendri, H., & Hardianto, W. T. (2025). *Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa terhadap Tingkat Kepercayaan Masyarakat pada Desa Kepuharjo Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang*. 9(4), 1463–1474.
- Aziz, N. J. A., Anggraini, W. A., & Pradani, T. (2024). Kajian Akuntabilitas Keuangan Dan Transparansi Dalam Menilai Kinerja Pemerintahan Desa. *Perwira Journal of Economics & Business*, 4(1), 109–117.
<https://doi.org/10.54199/pjeb.v4i1.301>
- Azora, P. (2021). Analisis Quick Count Dengan Menggunakan Metode Stratified Random Sampling Studi Kasus Pemilu Gubernur Kalimantan Barat 2018. *Buletin Ilmiah Matematika, Statistika Dan Terapannya*, 10(1), 43–50.
- Budhi, S. (2018). *Analisis statistik multivariate; dengan aplikasi sem pls smartpls 3.2.6. Expert*. <https://elibrary.bsi.ac.id/readbook/222147/analisis-statistik-multivariate-dengan-aplikasi-sem-pls-smartpls-3-2-6>
- Chen, H., & Volpe, R. P. (1998). *An analysis of personal financial literacy among college students*. 7(2), 107–128.
[https://doi.org/https://doi.org/10.1016/S1057-0810\(99\)80006-7](https://doi.org/https://doi.org/10.1016/S1057-0810(99)80006-7)
- Della, A. S., Anggraini, Y., Zulpiasari, A., Kurniawan, R., Yamani, M., Bengkulu, U., & History, A. (2025). *Jurnal-Hukum-Kuangan-Final*. 12(4).
- Ferdinand, A. (2014). *Metode penelitian manajemen: Pedoman penelitian untuk skripsi, tesis dan disertasi ilmu manajemen*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Firmansyah, A., Muhamad Rizal Yuniar, & Zef Arfiansyah. (2022). Kualitas Laporan Keuangan Di Indonesia: Transparansi Informasi Keuangan Dan Karakteristik Pemerintah Daerah. *Jurnal Anggaran Dan Keuangan Negara Indonesia (AKURASI)*. <https://doi.org/10.33827/akurasi2022.vol4.iss2.art180>
- Fong, J. H., Koh, B. S. K., Mitchell, O. S., & Rohwedder, S. (2021). Financial literacy and financial decision-making at older ages. *Pacific Basin Finance Journal*, 65(December 2020), 101481. <https://doi.org/10.1016/j.pacfin.2020.101481>
- Garson, G. D. (2016). Partial Least Squares: Regression & Structural Equation Models. In *Statistical Publishing Associates*. <https://doi.org/10.3726/978-3-0353-0280-6/8>
- Gedeona, H. T. (2020). Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah: Sebuah Alternatif Pemberantasan Korupsi di Tingkat Daerah. *Jurnal Ilmu Administrasi*, 2(3), 258–267.
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/hukum_progresif/article/view/655

- Hamid, R. S., & Anwar, S. M. (2019). *STRUCTURAL EQUATION MODELING (SEM) BERBASIS VARIAN: Konsep Dasar dan Aplikasi dengan Program SmartPLS 3.2.8 dalam Riset Bisnis*. PT Inkubator Penulis Indonesia.
- Haryono, S. (2016). Metode SEM Untuk Penelitian Manajemen dengan AMOS LISREL Smart PLS. *Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical*, 450.
- Hildawati. (2024). *Buku Ajar Metodologi Penelitian Kuantitatif & Aplikasi Pengolahan Analisa*.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (2019). THEORY OF THE FIRM : MANAGERIAL BEHAVIOR, AGENCY COSTS AND OWNERSHIP STRUCTURE. In *Corporate Governance*. Gower.
- Judijanto, L., Mulyapradana, A., & Hidayati, U. (2024). Analysis of the Effect of Public Administration Transparency on Public Trust in Indonesia. *Sciences Du Nord Humanities and Social Sciences*, 1(02), 69–76.
<https://doi.org/10.58812/snhss.v1i2.27>
- Kaiser, T., Lusardi, A., Menkhoff, L., & Urban, C. J. (2020). *FINANCIAL EDUCATION AFFECTS FINANCIAL KNOWLEDGE AND DOWNSTREAM BEHAVIORS*. 19(5), 1–23.
- Kaiser, T., & Menkhoff, L. (2017). Does financial education impact financial literacy and financial behavior, and if so, when? *World Bank Economic Review*.
<https://doi.org/10.1093/wber/lhx018>
- Khan, A., & Ahmad, I. (2021). Financial Literacy and Public Accountability: A Framework for Improving Financial Management in Local Governments. *Journal of Public Administration Research*.
- Lusardi, A., & Mitchell, O. S. (2014). The economic importance of financial literacy: Theory and evidence. *Journal of Economic Literature*.
<https://doi.org/10.1257/jel.52.1.5>
- Mardianah, A., & Iramani, R. (2021). Model Hubungan Literasi, Pengalaman dan Perilaku Pengelolaan Keuangan Keluarga: Peran Niat Berperilaku Sebagai Mediasi. *Manajemen Dan Keuangan*.
<https://doi.org/https://doi.org/10.33059/jmk.v10i2.3564>
- Mardiasmo. (2021). Akuntansi Sektor Publik. In Mardiasmo (Ed.), *Business & Economics*. CV. ANDI OFFSET.
- Maria Florensa, Andreas Rengga, & Konstantinus Pati Sanga. (2024). Pengaruh Literasi Keuangan dan Sikap Keuangan terhadap Perilaku Pengelolaan Keuangan Mahasiswa. *Jurnal Mutiara Ilmu Akuntansi*, 2(4), 210–234.
<https://doi.org/10.55606/jumia.v2i4.3339>

- Maritza, D. F., & Taufiqurokhman, T. (2024). Peranan Masyarakat Sipil dalam Peningkatan Akuntabilitas Birokrasi Melalui Pengawasan Publik yang Aktif. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 14(1), 71–84.
<https://doi.org/10.33592/jiia.v14i2.4679>
- Mastur, A. S. R., Rinojati, M., & Fathya, V. N. (2025). Examination of Ethics in Public Service: An Indonesian Perspective. *Public Administration Quarterly*.
<https://doi.org/https://doi.org/10.1177/07349149251345410>
- Meityas, R., Irfan Budiono, & Muhammad Taufik. (2025). Pengaruh Literasi Keuangan Dan Gaya Hidup Terhadap Pengelolaan Keuangan Generasi Sandwich. *Jurnal Publikasi Ekonomi Dan Akuntansi*, 5(1), 93–104.
<https://doi.org/10.51903/jupea.v5i1.4514>
- Nurritziana, B., Handayani, L., & Widiastuty, E. (2017). Determinan Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah dan Implikasinya Terhadap Kepercayaan Public-Stakeholders. *Jurnal Akuntansi Dan Investasi*, 18(1), 28–47. <https://doi.org/10.18196/jai.18159>
- OJK. (2022). *Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2022*.
- Pah, V. C. (2025). Studi Kepustakaan: Akuntabilitas dan Transparansi Pelaporan Keuangan dalam Organisasi Nirlaba. *Musytari : Jurnal Manajemen, Akuntansi, Dan Ekonomi*, 16(4), 111–120.
<https://ejournal.warunayama.org/index.php/musytarineraca/article/view/12337>
- Purwidiyanti, W., & Tubastuvi, N. (2019). The Effect of Financial Literacy and Financial Experience on SME Financial Behavior in Indonesia. *Jurnal Dinamika Manajemen*, 10(1), 40–45. <https://doi.org/10.15294/jdm.v10i1.16937>
- Putra, A. (2020). *Transparansi Keuangan Publik dan Legitimasi Pemerintah*. *Jurnal Administrasi Publik*.
- Putri, A. W., Himawan, A., Sawitri, A. A., Muthmainah, D., Pramita, E., Liswijayanti, F., Yuniar, M., & Sautlan, M. (2023). Literasi Keuangan. In *Banking Journalist Academy* (Issue March 2024).
- Rahmatika, D. P., & Martyas Edi, S. W. (2022). Pengembangan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Web Untuk Bendahara Dusun Sidawung. *IT-Explore: Jurnal Penerapan Teknologi Informasi Dan Komunikasi*, 1(1), 33–48.
<https://doi.org/10.24246/itexplore.v1i1.2022.pp33-48>
- RAHMAWATI, N. E., & Dr. Hardo Basuki, M.Soc., Sc. (2013). *PENGARUH AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PEMERINTAH DAERAH TERHADAP KEPUASAN DAN KEPERCAYAAN MASYARAKAT*.
- Rinaldi, A., & Devi, Y. (2022). Pengaruh Literasi Keuangan Syariah Terhadap Kepercayaan Muzaki Pada Lembaga Pengelola Zakat Dengan Akuntabilitas Dan

Transparansi Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Masyarakat Muslim Di Propinsi Lampung). *Al-Mal: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 3(1), 64–84. <https://doi.org/10.24042/al-mal.v3i1.11428>

Ringle, C. M., Wende, S., & Becker, J.-M. (2024). *SmartPLS 4. Bönningstedt: SmartPLS*. <https://www.smartpls.com>

Rizki, R., & Wulandari, R. (2022). Implementasi Transparansi Anggaran di Pemerintah Daerah: Studi Kasus di Kota Yogyakarta. *Administrasi Publik*.

Rosalia, O., Mulyanti, D. R., Susianto, T. E., Noviyya, A., & Purnomo, R. (2025). The influence of Financial Literacy on Personal Financial Management in millennials in Indonesia. *Nomico*, 1(12), 109–118. <https://doi.org/10.62872/w09ms059>

Rosidah, I., Gunardi, Priatna Kesumah, & Royke Bahagia Rizka. (2023). Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Pencegahan Fraud Diinstansi Pemerintah (Studi Kasus Kantor Kec. Ciwidey). *Jurnal Ekonomi Manajemen Bisnis Dan Akuntansi : EMBA*, 2(1), 137–156. <https://doi.org/10.59820/emba.v2i1.110>

Santoso, A. D., & Rahardjo, D. S. (2021). *PLS dan GeSCA dalam Analisis Kuantitatif*. <https://www.scribd.com/document/625856396/FIX-Buku-PLS-Dan-GeSCAM-Dlm-Analisis-Kuantitatif-2021-Penulis2-Dwi-Sihono-Raharjo>

Sarangi, A. K., & Pradhan, R. P. (2020). *ICT infrastructure and economic growth: a critical assessment and some policy implications*. 47, pages 363–383. <https://doi.org/https://doi.org/10.1007/s40622-020-00263-5>

Sari, M., Rachman, H., Astuti, N. J., Afgani, M. W., & Siroj, R. A. (2023). Explanatory Survey dalam Metode Penelitian Deskriptif Kuantitatif Jurnal Pendidikan Sains dan Komputer. *Jurnal Pendidikan Sains Dan Komputer*, 3(1), 10–16. <https://jurnal.itscience.org/index.php/jpsk/article/download/1953/1528>

Sarstedt, M., Ringle, C. M., & Hair, J. F. (2021). Partial Least Squares Structural Equation Modeling. In *Handbook of Market Research* (Issue July). https://doi.org/10.1007/978-3-319-57413-4_15

Savitri, C., Faddila, S. P., Irmawartini, Iswari, H. R., Anam, C., Syah, S., Mulyani, S. R., Sihombing, P. R., Kismawadi, E. R., Pujiyanto, A., Mulyati, A., Astuti, Y., Adinugroho, W. C., Imanuddin, R., Kristia, Nuraini, A., & Siregar, M. T. (2021). *Statistik Multivariat dalam Riset*. Widina Bhakti Persada Bandung. https://www.researchgate.net/profile/Wahyu-Adinugroho/publication/358087928_STATISTIK_MULTIVARIAT_DALAM_RISET/links/61ef5d9b5779d35951d15cf1/STATISTIK-MULTIVARIAT-DALAM-RISET.pdf

Sofyani, H., & Tahar, A. (2021). Peran Akuntabilitas Dan Transparansi Pemerintah Desa Indonesia Terhadap Kepercayaan Masyarakat Desa: Kasus Di Kabupaten

Bantul. *Jurnal Akademi Akuntansi*, 4(1), 10–25.
<https://doi.org/10.22219/jaa.v4i1.16481>

Soputra, A. N., Yogatama, A., & Hadi, I. P. (2023). Effectiveness of #FeelThePower Campaign Message on the Followers of Azarine Cosmetic's Instagram Account. *Journal of Content and Engagement*, 1(1), 18–32.
<https://doi.org/10.9744/joce.1.1.18-32>

Subhaktiyasa, P. G. (2024). Pendekatan Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan*, 9(4), 2721–2731.

Sugiyono. (2020). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*.

Suhardi, U. U., Pribadi, U., & Losi, Z. (2023). The Effects of Good Governance Principles: Accountability, Transparency, and Participation on Public Trust in Village Funds Management. *International Journal of Social Science and Business*, 7(4), 1050–1060. <https://doi.org/10.23887/ijssb.v7i4.57648>

Supriyadi, A., & Prasetyo, S. (2021). Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah dan Pengaruhnya terhadap Kepercayaan Publik. In *Akuntansi dan Keuangan* (Vol. 23, Issue 1, pp. 45–60).

Susanti, D., Sujianto, S., Tua, H., As'ari, H., & Yulia, D. (2025). Impacts of community participation, multi-actor collaboration, transparency, and accountability on village financial governance in Rokan Hulu, Indonesia. *Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 15(1), 234–250. <https://doi.org/10.26618/ojip.v15i1.15900>

Wahyu Hari Prihantono. (2024). *Pengaruh Literasi Keuangan dan Sikap Keuangan dengan Perilaku Tata Kelola Keuangan Terhadap Kepuasan Keuangan*. 13(1), 1–12.

Waruwu, M., Pu'at, S. N., Utami, P. R., Yanti, E., & Rusydiana, M. (2025). Metode Penelitian Kuantitatif: Konsep, Jenis, Tahapan dan Kelebihan. *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan*, 10(1), 917–932. <https://doi.org/10.29303/jipp.v10i1.3057>

Wiyono, G. (2020). *Merancang penelitian bisnis dengan alat analisis spss 25 & smartpls 3.2.8*.

World Bank. (2020). *Trading for Development in the Age of Global Value Chains*.

Yuwono, W., Susanna, Ramadhani, D. S., Sasmita, E. W., & Sihotang, W. H. (2023). Analysis of the Influence of the Role of Financial Literacy on Personal Financial Management. *European Journal of Business and Management Research*, 8(3), 57–61. <https://doi.org/10.24018/ejbmr.2023.8.3.1891>